



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pengadilan Agama Maumere

2019



PENGADILAN AGAMA MAUMERE

Jl. Diponegoro Wolomarang Maumere Telp. (0382) 21134/ 23514

Website : pa-maumere.go.id | email : pa.maumere@gmail.com

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Alhamdulillahirabbil'alamin puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayahNya sehingga Laporan Tahunan Pengadilan Agama Maumere Tahun 2019 dapat kami susun dan kami sampaikan sesuai dengan waktu yang diharapkan.

Penggunaan sistem TI (Teknologi Informasi) yang semakin pesat membuat peningkatan bentuk-bentuk penyajian pelaporan dinamis dan akuntabel atas gambaran kinerja yang telah dilakukan.

Dalam laporan Pelaksanaan Kegiatan ini kami sajikan hal-hal yang berkenaan dengan kegiatan pokok yang terkait dengan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Maumere sebagai salah satu alat kelengkapan negara bidang pelayanan masyarakat di bidang hukum tertentu di wilayah hukum Kabupaten Sikka.

Laporan ini adalah informasi gambaran riil keberhasilan pelaksanaan tugas pokok serta kegiatan selama tahun 2019 dan hambatan yang dihadapi serta upaya pemecahannya, dimaksudkan pula untuk internal sebagai dasar evaluasi penyempurnaan pelaksanaan tugas berikutnya dan untuk institusi yang berwenang agar diketahui guna bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.

Demi peningkatan penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan di tahun yang akan datang, segala saran konstruktif dari para pengguna laporan ini sangat kami harapkan.

Dalam penyajian format dan substansi laporan ini mungkin ada kekurangan mohon pembenahan dan saran seperlunya.



Wassalam,
Maumere, 02 Januari 2020

Ketua,

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730804 200112 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I Pendahuluan	1
BAB II A. Keadaan Perkara di Peradilan Agama.....	18
- Keadaan Perkara Tingkat Pertama	18
- Keadaan Perkara Tingkat Banding	21
- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	22
- Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	23
B. Penyelesaian Perkara	24
- Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus	24
- Jumlah Perkara Yang Putus Tepat Waktu	25
- Jumlah Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK	27
- Jumlah Perkara Yang Berhasil di Mediasi	27
C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikat ISO Pengadilan)...	28
- Pos Bantuan Hukum (Posbakum)	31
- Sidang Keliling	32
- Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)	34
BAB III Sumber Daya Manusia	35
Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan Kepangkatan, Golongan dan Pendidikan	35
- Mutasi	47
- Promosi	49
- Pensiun	50
- Diklat Teknis dan Non Teknis	50

BAB IV Pengelolaan Keuangan, Sarana Dan Prasarana, Dan Teknologi	
Informasi	54
A. Pengelolaan Keuangan	54
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....	59
C. Pengelolaan Teknologi Informasi Terkait SIPP.....	67
- Implementasi <i>E-Court</i>	67
- Implementasi Sistim Informasi Penelusuran Perkara	69
(SIPP)	
BAB V Pelayanan Publik yang Prima	72
- Akreditasi Penjaminan Mutu	72
- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	82
- Inovasi Pelayanan Publik	83
BAB VI Pengawasan	92
A. Internal	92
B. Evaluasi	96
BAB VII Penutup	100
A. Kesimpulan	100
B. Rekomendasi	102
LAMPIRAN	104
1. SK. Tim Penyusun Laporan Tahunan Pengadilan Agama	104
Maumere Tahun 2019.....	
2. Foto-foto Kegiatan Pengadilan Agama Maumere tahun 2019..	107

BAB I

PENDAHULUAN

- Kebijakan Umum Peradilan

Gambar. 1. Foto Gedung Kantor PA. Maumere



Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen disebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada

dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi” dengan amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya bab IX tentang kekuasaan kehakiman, sebagai respon terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, dan sebagai tindak lanjut dari penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.

Seiring perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dimasyarakat dan ketatanegaraan menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dan lahirlah Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan pasal 21 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 dinyatakan bahwa “organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya

berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut lahirlah apa yang disebut dengan **Peradilan Satu Atap**.

Sementara itu, dalam pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam Undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Sebagai realisasi dari pasal tersebut untuk peradilan agama lahirlah Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Gerakan pembaharuan peradilan selalu ditingkatkan dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan peradilan dibawahnya, segala inovasi dicanangkan guna memenuhi peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan dimulai dengan ditetapkannya *Blue Print* (Cetak Biru) 2010-2035, Rencana Strategis Mahkamah Agung RI, Road Map Penerapan Cetak Biru, pelaksanaan Reformasi Birokrasi, pelaksanaan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM, Akreditasi Penjaminan Mutu, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Pendaftaran perkara secara elektronik (*E-Court*) dengan komponen pendaftaran (*E-Filing*), pembayaran (*E-Payment*), Pemanggilan (*E-Summon*), Biaya Prodeo, biaya Sidang Keliling dan *E-Litigasi* serta audio pencegahan gratifikasi yang wajib setiap hari dibacakan, hal ini merupakan terobosan baru guna menyongsong Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya menuju era baru peradilan modern berbasis Teknologi Informasi (TI).

Bukan hanya Mahkamah Agung RI yang berupaya melakukan terobosan dan pembaharuan yang terus menerus guna meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat pencari keadilan, Badan Peradilan Agama juga mengeluarkan 9 (sembilan) aplikasi unggulan guna mendukung secara maksimal program kerja Mahkamah Agung RI. Adapun 9 aplikasi yang di maksud yaitu :

1. Aplikasi antrian sidang;
2. Aplikasi informasi Perkara;
3. Aplikasi notifikasi perkara;
4. Aplikasi *E-K Keuangan*;

5. Aplikasi *E-Register*;
6. Aplikasi PNBP fungsional;
7. Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan;
8. Aplikasi *E-Examinasi*;
9. Comman Center.

Pengadilan Agama Maumere, sebagai pengadilan Tingkat Pertama (*Judexfactie*) merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Berdasarkan amanah Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka sejak saat itu tugas dan wewenang Peradilan Agama bertambah yaitu, Memeriksa, Memutus dan menyelesaikan setiap perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syari'ah.

Merespon program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung maupun Dirjen Badilag berdasarkan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Maumere, program-program tersebut diatas walaupun dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia, administrasi, financial, Sarana dan prasarana tetapi Pengadilan Agama Maumere telah melaksanakan seluruh program tersebut baik Program Akreditasi Penjaminan Mutu (APM), Reformasi Birokrasi, Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI maupun 9 (sembilan) aplikasi unggulan Dirjen Badan Peradilan Agama dengan prinsip pelayanan 3 S (Senyum, Salam, Sapa), dan 5 R (*Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin*) demi memenuhi kebutuhan pelayanan yang prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Walaupun dalam pelaksanaanya belum secara optimal karena masih terdapat kendala-kendala dalam implementasi aplikasi tersebut, seperti aplikasi PNBP *On-line* yang secara realitasnya masih terdapat beberapa konten dalam aplikasi tersebut belum lengkap sesuai kebutuhan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, sehingga kami sangat mengharapkan kepada tim

pengembangan aplikasi pada instansi Mahkamah Agung RI dan Badan peradilan Agama untuk segera membenahi kekurangan-kekurangan dalam optimalisasi aplikasi yang telah dirilis guna lebih memaksimalkan pelayanan pada masyarakat pencari keadilan.

Pengadilan Agama Maumere sebagai salah satu Pengadilan yang melaksanakan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) yang dulunya SAPM di Tahun 2018 dan telah mendapatkan nilai dengan predikat A “*Excellent*”, Pengadilan Agama Maumere juga pada Tanggal 26 s.d. 28 Juni Tahun 2019 telah menyelesaikan *Assesmen Surveillance I* oleh Asessor eksternal, dan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 5367/DJA/OT.01.3/X/2019 Tanggal 30 Oktober 2019 perihal Hasil Penilaian Akreditasi Penjaminan Mutu Tahun 2018 dan Tahun 2019, dengan ucapan rasa syukur yang tak terhingga karena Pengadilan Agama Maumere dapat mempertahankan prestasi yang telah dicapai sebelumnya dengan predikat A “*Excellent*”, capaian ini tidak lain dari sebuah wujud komitmen dan kebersamaan dengan nilai-nilai kekeluargaan dari seluruh aparaturnya dalam mewujudkan implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu di Pengadilan Agama Maumere, tak berhenti sampai disitu Pengadilan Agama Maumere di tahun 2019 juga mendapatkan beberapa penghargaan dalam pelaksanaan pelayanan dan kinerja yaitu :

- Keberhasilan dalam mencapai Peringkat ke-3 nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan I Tahun 2019, yang penghargaanannya di berikan oleh KPPN Ende yang diserahkan tanggal 30 April 2019;
- Keberhasilan dalam mengimplementasikan Aplikasi E-Court di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama NTT yang penghargaanannya di berikan oleh oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama NTT tanggal 25 Juli 2019;
- Keberhasilan mencapai Peringkat ke-3 atas kelengkapan data dan E-Doc Aplikasi Back up Sikep (ABS) Pengadilan Agama Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama NTT yang penghargaanannya di berikan oleh oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama NTT tanggal 25 Juli 2019;
- Keberhasilan dalam mencapai Peringkat ke-I satker terbaik kategori Kecepatan dan Keakuratan.

- Penyampaian LPJ dan Rekonsiliasi UAKPA Tahun 2019 yang penghargaanannya di berikan oleh KPPN Ende yang diserahkan tanggal 30 April 2019.



Gambar 2. Foto Penghargaan Peringkat Ke-3 nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Triwulan I Tahun 2019

Gambar 3 Foto Penghargaan Implementasi Aplikasi E-Court di Wilayah Hukum PTA. NTT



Gambar.4 Foto Penghargaan Peringkat ke-3 Atas Kelengkapan Data dan E-DOC Pada Aplikasi ABS Sikep Badilag



Gambar 5. Foto Penghargaan Peringkat Ke-1 Satker terbaik kategori Kecepatan dan Keakuratan Penyampaian LPJ dan Rekonsiliasi UAKPA Tahun 2019



Pengadilan Agama Maumere tak pernah surut dalam berbenah diri baik dalam hal peningkatan kualitas kinerja, memberikan pelayanan secara internal maupun dalam pelaksanaan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan, semoga apa yang menjadi prestasi saat ini tidak menjadi titik kepuasan bahkan seyogyanya menjadi energi penyemangat untuk dapat di pertahankan dan ditingkatkan.

Sebagai tindaklanjut dari sebuah pembaharuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama Maumere berdasarkan kompetensi tugas dan wewenang juga telah melaksanakan dan mengimplementasikan 6 (enam) area perubahan Reformasi Birokrasi yang terdiri dari :

1. Manajemen Perubahan (pola pikir dan budaya kerja)
2. Penataan Tata Laksana;
3. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM);
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
5. Penguatan Pengawasan;
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Pengadilan Agama Maumere berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Maumere berkedudukan di Kota Maumere dengan letak geografis terletak antara 806'36"LS – 8048'0"LS dan 121040'12"BT – 122041'24"BT. dengan alamat di Jalan Diponegoro, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka dengan wilayah hukum terdiri dari 21 Kecamatan dan 160 Kelurahan/Desa yang tersebar sebagaimana berikut :

Tabel 1. Daftar Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere Tahun 2019

No	Nama Kecamatan dan Kelurahan / Desa		Radius	Jarak (Km)
1	2		3	4
1	Kecamatan Alok			
	1	Kel. Kota Uneng	I	0 – 20 Km
	2	Kel. Nagalimang	I	0 – 20 Km
	3	Kel. Madawat	I	0 – 20 Km
	4	Kel. Kabor	I	0 – 20 Km
	5	Desa Pemana	Antar Pulau I	-

	6	Desa Gunung Sari	Antar Pulau I	-
	7	Desa Samparong	Antar Pulau IV	-
2	Kecamatan Alok Timur			
	1	Kel Waioti	I	0 – 20 Km
	2	Kel. Kota Baru	I	0 – 20 Km
	3	Kel. Beru	I	0 – 20 Km
	4	Kel. Wairotang	I	0 – 20 Km
	5	Kel. Nangameting	I	0 – 20 Km
	6	Desa Lepolima	Antar Pulau V	-
	7	Desa Watugong	II	-
	8	Desa Kojadoi	Antar Pulau III	-
	9	Desa Kojagete	Antar Pulau III	-
	10	Desa Parumaan	Antar Pulau II	-
3	Kecamatan Alok Barat			
	1	Kel. Wuring	I	0 – 20 Km
	2	Kel. Hewuli	I	0 – 20 Km
	3	Kel. Wailiti	I	0 – 20 Km
	4	Kel. Wolomarang	I	0 – 20 Km
4	Kecamatan Nita			
	1	Desa Tilang	I	0 – 20 Km
	2	Desa Lusitada	I	0 – 20 Km
	3	Desa Bloro	I	0 – 20 Km
	4	Desa Tebuk	I	0 – 20 Km
	5	Desa Nita	I	0 – 20 Km
	6	Desa Takaplager	II	20 – 40 Km
	7	Desa Nitaloang	II	20 – 40 Km
	8	Desa Wuliwutik	II	20 – 40 Km
	9	Desa Ladogahar	II	20 – 40 Km
	10	Desa Riit	II	20 – 40 Km
	11	Desa Nirangkuling	II	20 – 40 Km
	12	Desa Maheboro	II	20 – 40 Km
5	Kecamatan Lela			
	1	Desa Kolidetung	II	20 – 40 Km
	2	Desa korowuwu	II	20 – 40 Km
	3	Desa Hepang	II	20 – 40 Km
	4	Desa Lela	II	20 – 40 Km
	5	Desa Watutedang	II	20 – 40 Km
	6	Desa Sikka	II	20 – 40 Km
	7	Desa Ligai	II	20 – 40 Km

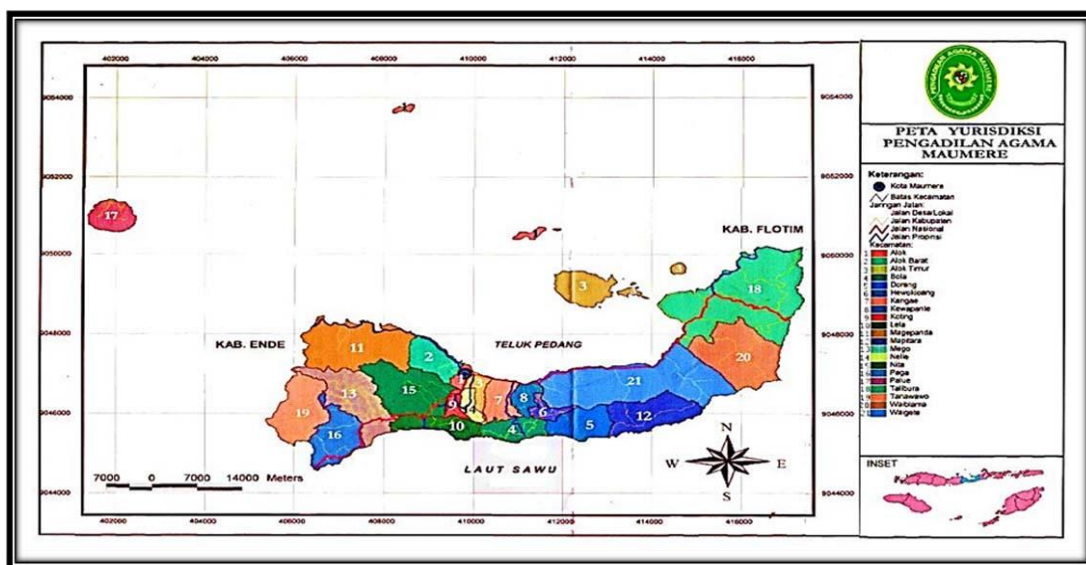
	8	Desa Baopaat	II	20 – 40 Km
	9	Desa Du	II	20 – 40 Km
6	Kecamatan Kewapante			
	1	Desa Umagera	II	20 – 40 Km
	2	Desa Lantena	II	20 – 40 Km
	3	Desa Kopong	II	20 – 40 Km
	4	Desa Seusina	II	20 – 40 Km
	5	Desa Namangkewa	II	20 – 40 Km
	6	Desa Waiera	II	20 – 40 Km
	7	Desa Geliting	II	20 – 40 Km
	8	Desa Wairkoja	II	20 – 40 Km
7	Kecamatan Bola			
	1	Desa Hokor	III	40 – 60 Km
	2	Desa Wolonwalu	III	40 – 60 Km
	3	Desa Wolokoli	III	40 – 60 Km
	4	Desa Bolo	III	40 – 60 Km
	5	Desa Umuta	III	40 – 60 Km
	6	Desa ipir	III	40 – 60 Km
8	Kecamatan Waigete			
	1	Desa Pogon	II	20 – 40 Km
	2	Desa Aiburua	II	20 – 40 Km
	3	Desa Wairbleler	II	20 – 40 Km
	4	Desa Hoder	II	20 – 40 Km
	5	Desa Egon	II	20 – 40 Km
	6	Desa Nangatobong	II	20 – 40 Km
	7	Desa Waierterang	II	20 – 40 Km
	8	Desa Watudiran	II	20 – 40 Km
	9	Desa Rumut	II	20 – 40 Km
9	Kecamatan Talibura			
	1	Desa Talibura	Daerah Sulit I	-
	2	Desa Darat Gunung	Daerah Sulit I	-
	3	Desa Darat Pantai	Daerah Sulit I	-
	4	Desa Nebe	Daerah Sulit I	-
	5	Desa Hikong	Daerah Sulit I	-
	6	Desa Kringa	Daerah Sulit I	-
	7	Desa Ojang	Daerah Sulit I	-
	8	Desa Wailamung	Daerah Sulit I	-
	9	Desa Lewomodo	Daerah Sulit I	-
	10	Desa Timutawa	Daerah Sulit I	-
	11	Desa Bangko'or	Daerah Sulit I	-

	12	Desa Nangahale	Daerah Sulit I	-
10		Kecamatan Nele		
	1	Desa Nelle Wutung	I	0 – 20 Km
	2	Desa Nelle Lorang	I	0 – 20 Km
	3	Desa Manuburu	I	0 – 20 Km
	4	Desa Nelee Barat	I	0 – 20 Km
	5	Desa Nelle Urung	I	0 – 20 Km
11		Kecamatan Magepanda		
	1	Desa Kolisia A	II	20 – 40 Km
	2	Desa Magepanda	II	20 – 40 Km
	3	Desa Reroroja	II	20 – 40 Km
	4	Desa Kolisia B	II	20 – 40 Km
	5	Desa Done	II	20 – 40 Km
12		Kecamatan Koting		
	1	Desa Koting A	I	0 – 20 Km
	2	Desa Koting B	I	0 – 20 Km
	3	Desa Koting C	I	0 – 20 Km
	4	Desa Koting D	I	0 – 20 Km
	5	Desa Paubekor	I	0 – 20 Km
	6	Desa Ribang	I	0 – 20 Km
13		Kecamatan Hewokloang		
	1	Desa Hewopkloang	II	20 – 40 Km
	2	Desa Hewopuat	II	20 – 40 Km
	3	Desa Wolompa	II	20 – 40 Km
	4	Desa Rubit	II	20 – 40 Km
	5	Desa Baomekot	II	20 – 40 Km
	6	Desa Munerana	II	20 – 40 Km
	7	Desa Kajowair	II	20 – 40 Km
14		Kecamatan Kangae		
	1	Desa Teka iku	II	20 – 40 Km
	2	Desa Mekendetung	Daerah Sulit I	
	3	Desa Blatation	II	20 – 40 Km
	4	Desa Kokowahor	II	20 – 40 Km
	5	Desa Watumilok	II	20 – 40 Km
	6	Desa Tanaduen	II	20 – 40 Km
	7	Desa Watuliwung	II	20 – 40 Km
	8	Desa Habi	II	20 – 40 Km
	9	Desa Langir	II	20 – 40 Km
15		Kecamatan Doreng		
	1	Desa Wolomotong	III	40 – 60 Km

	2	Desa Kloangpopot	III	40 – 60 Km
	3	Desa Wogalirit	III	40 – 60 Km
	4	Desa Waihawa	III	40 – 60 Km
	5	Desa Nenbura	III	40 – 60 Km
	6	Desa Wolonterang	III	40 – 60 Km
	7	Desa watumerak	III	40 – 60 Km
16	Kecamatan Mapitara			
	1	Desa Natakoli	III	40 – 60 Km
	2	Desa Hebing	III	40 – 60 Km
	3	Desa Hale	III	40 – 60 Km
	4	Desa Egongahar	III	40 – 60 Km
17	Kecamatan Waiblama			
	1	Desa Natarmage	III	40 – 60 Km
	2	Desa Pruda	III	40 – 60 Km
	3	Desa Werang	Daerah Sulit I	-
	4	Desa Tanarawa	Daerah Sulit I	-
	5	Desa Linmedo	Daerah Sulit I	-
	6	Desa Tua Bao	Daerah Sulit I	-
18	Kecamatan Paga			
	1	Desa Wolowiro	Daerah Sulit I	-
	2	Desa Maulo'o	Daerah Sulit I	-
	3	Desa Mbegu	Daerah Sulit I	-
	4	Desa Paga	III	40 – 60 Km
	5	Desa Lenanderata	Daerah Sulit I	-
	6	Desa Masebewa	Daerah Sulit I	-
	7	Desa Wolorega	Daerah Sulit I	-
	8	Desa Wolowena	Daerah Sulit I	-
19	Kecamatan Mego			
	1	Desa Korobhera	Daerah Sulit II	-
	2	Desa Dobo	Daerah Sulit II	-
	3	Desa Bhera	Daerah Sulit II	-
	4	Desa Wolodhesa	Daerah Sulit II	-
	5	Desa Gera	Daerah Sulit II	-
	6	Desa Liakutu	Daerah Sulit II	-
	7	Desa Parabubu	Daerah Sulit II	-
	8	Desa Dobo Nua Pu'a	Daerah Sulit II	-
	9	Desa Kowi	Daerah Sulit II	-
	10	Desa Napugera	Daerah Sulit II	-
20	Kecamatan Tanawawo			
	1	Desa Bu Selatan	Daerah Sulit II	-

	2	Desa Detubinga	Daerah Sulit II	-
	3	Desa Bu Utara	Daerah Sulit II	-
	4	Desa Bu Watuweti	Daerah Sulit II	-
	5	Desa Loke	Daerah Sulit II	-
	6	Desa Renggarasi	Daerah Sulit II	-
	7	Desa Poma	Daerah Sulit II	-
	8	Desa Tuwa	Daerah Sulit II	-
21	Kecamatan Palue			
	1	Desa Maluriwu	Antar Pulau V	-
	2	Desa Rokirole	Antar Pulau V	-
	3	Desa Tuanggeo	Antar Pulau V	-
	4	Desa Ladolaka	Antar Pulau V	-
	5	Desa Nitunglea	Antar Pulau V	-
	6	Desa Reruwairere	Antar Pulau V	-
	7	Desa Kesokoja	Antar Pulau V	-
	8	Desa Lidi	Antar Pulau V	-

Gambar 6. Foto Peta Yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere



Sebagai daerah yang berada di Kepulauan Flores dituntut untuk lebih memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi (TI) untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan terhadap para pencari keadilan, serta untuk memenuhi tuntutan keterbukaan informasi publik yang menjadi salah satu tujuan utama Reformasi Birokrasi.

Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) oleh Pengadilan Agama Maumere sebagai bagian mewujudkan peningkatan transparansi pengadilan sebagaimana amanah Surat

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sudah dilakukan dengan menyediakan media *Website* : www.pa-maumere.go.id. yang dapat di akses oleh masyarakat pencari keadilan secara umum, serta media Teknologi Informasi (TI) pendukung lainnya khusus internal aparatur Pengadilan Agama Maumere yaitu aplikasi Pengelolaan Data dan Pengusulan Pegawai dengan Sistim Informasi Kepegawaian (SIKEP) MARI dan *Aplikasi Backup Sikep* (ABS) Badilag MARI, Aplikasi Komdanas (Biaya Perkara, Kepegawaian dan Keuangan), Aplikasi PNBPN SIMARI, E-Biling Simponi, Movev Bappenas, SAKPA, SILABI, dan *email* : pa.maumere@gmail.com.

- **Visi dan Misi**

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan tugas, Pengadilan Agama Maumere telah menyusun program kerja sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Agama Maumere dalam pencapaian Visi dan Misi serta tujuan organisasi.

Visi

Visi Pengadilan Agama Maumere mengacu pada visi Mahkamah Agung RI yaitu “TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA MAUMERE YANG AGUNG”.

Misi

Sedangkan untuk mencapai Visi tersebut Pengadilan Agama maumere menetapkan Misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Maumere;
2. Memberikan pelayanan hukum yang prima dan berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan profesionalitas dan kredibilitas aparatur Pengadilan Agama Maumere;
4. Meningkatkan pengawasan dan transparansi di Pengadilan Agama Maumere.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pengadilan Agama Maumere tersebut, perlu membuat Motto sebagai identitas suplemen penyemangat kepada seluruh aparatur Pengadilan Agama Maumere, adapun Motto Pengadilan agama maumere adalah “**CERDAS**” (*Cakap, Efektif dan Efisien, Ramah, Dinamis, Akuntabel, Sinergitas*).

Motto dan Visi Misi juga rutin dibaca bersama setiap apel pagi pada hari senin.

- Rencana Strategis (Renstra)

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi, Pengadilan Agama Maumere mengambil langkah-langkah kebijakan yang dituangkan dalam Rencana Strategi (RENSTRA). Dengan rencana strategis ini maka implementasi target, output dan out come yang diinginkan tercapai. Rencana Strategis Pengadilan Agama Maumere telah dibuat sejak tahun 2015, terakhir disusun Rencana Strategis 2015-2019 yang sudah ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan kerja untuk tahun 2019.

Adapun Rencana Strategis Pengadilan Agama Maumere tahun 2015-2019 tersebut sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Tabel. 2. Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2015 - 2019

No	Sasaran		Target				
	Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		c. Persentase penurunan sisa perkara	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		d. Persentase perkara yang tidak					

		mengajukan upaya hukum : 1. Banding 2. Kasasi 3. PK	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
			95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
			100%	100 %	100 %	95 %	95 %
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

3	Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		c. Persentase perkara permohonan (<i>Voluntair</i>) identitaas hukum	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

- **Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Pengadilan Agama Maumere telah menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019 berdasarkan SK. Ketua Pengadilan Agama Maumere Nomor : W23-A9/ 83 /OT.01.1/SK/1/2019 tanggal 02 Januari 2019 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel. 3. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019

NO	TUJUAN		PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA			
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan	Jumlah sisa perkara tahun lalu dibagi jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan dikali seratus persen	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dibagi jumlah perkara yang ada dikali seratus persen	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	Sisa perkara tahun lalu dibagi sisa perkara tahun sebelumnya dikali seratus persen	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : <input type="checkbox"/> Banding <input type="checkbox"/> Kasasi <input type="checkbox"/> PK	Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dibagi jumlah putusan perkara dikali seratus persen	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	Indeks kepuasan pencari keadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase isi putusan yang di terima oleh pihak tepat waktu	Jumlah isi putusan yang diterima tepat waktu dibagi jumlah perkara yang dilakukan mediasi dikali seratus persen	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dibagi jumlah perkara yang dilakukan mediasi dikali seratus persen	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat	Jumlah berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan PK secara lengkap dibagi jumlah berkas perkara yang	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan

		waktu.	dimohonkan upaya hukum dikali seratus persen		
		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang diupload dalam website dibagi jumlah putusan perkara dikali seratus persen	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dibagi jumlah perkara prodeo dikali seratus persen	Dirjen Badilag dan Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan.	Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan dibagi jumlah perkara yang seharusnya diselesaikan diluar gedung Pengadilan dikali seratus persen	Dirjen Badilag dan Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
		c. Persentase perkara permohonan (<i>Voluntair</i>) identitas hukum.	Jumlah perkara volunteer identitas hukum yang diselesaikan dibagi Jumlah perkara Volunteer identitas hukum yang diajukan dikali seratus persen	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Tahunan
		d. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum).	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dibagi jumlah pencari keadilan golongan tertentu dikali seratus persen	Dirjen Badilag dan Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan
4	Meningkatnya Kepautahan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi).	Jumlah putusan perkara yang ditindaklanjuti dibagi jumlah putusan perkara yang sudah BHT dikali seratus persen	Panitera	Laporan Bulanan dan Tahunan

BAB II

KEADAAN PERKARA

A. Keadaan Perkara di Peradilan Agama

- Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Keadaan perkara adalah suatu laporan tentang keadaan perkara pada Pengadilan Agama Maumere yang diuraikan dengan meliputi sisa perkara tahun lalu, perkara yang masuk pada tahun berjalan yang dilengkapi dengan Jenis perkara, perkara yang putus ditahun berjalan, sisa perkara tahun berjalan, Pengelolaan Biaya Proses dan Keadaan Keuangan Perkara yang penyajiannya digambarkan baik dalam suatu narasi, statistik, maupun grafik.

Keadaan Perkara Pengadilan Agama Maumere Tahun 2019 dapat dilihat pada rincian sebagai berikut :

Kondisi Perkara pada Pengadilan Agama Maumere dalam tahun 2019 :

- | | |
|------------------------------------|--------------|
| a. Sisa perkara tahun 2018 | : 12 Perkara |
| b. Perkara masuk tahun 2019 | : 55 Perkara |
| c. Perkara yang diputus tahun 2019 | : 64 Perkara |

Dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| • Perkara yang dicabut | : 3 Perkara |
| • Perkara yang dikabulkan | : 59 Perkara |
| • Perkara yang ditolak | : 1 Perkara |
| • Perkara yang tidak diterima | : 0 Perkara |
| • Perkara yang di gugurkan | : 0 Perkara |
| • Perkara yang dicoret | : 1 Perkara |

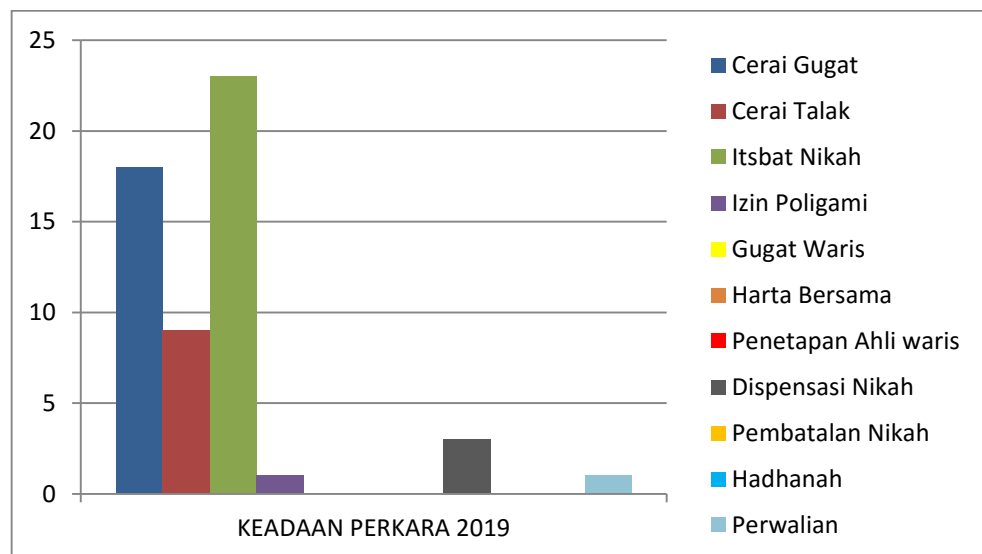
Perkara yang diterima Pengadilan Agama Maumere dalam tahun 2019, berjumlah 55 perkara, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel . 4. Jenis dan Jumlah Perkara PA. Maumere Tahun 2019

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	
1.	Cerai Gugat	18	Perkara
2.	Cerai Talak	9	Perkara
3.	Itsbat Nikah	23	Perkara
4.	Izin Poligami	1	Perkara
5.	Gugat Waris	0	Perkara
6.	Harta Bersama	0	Perkara
7.	Penetapan Ahli Waris	0	Perkara
8.	Dispensasi Nikah	3	Perkara
9.	Pembatalan Nikah	0	Perkara
10.	Hadhanah	0	Perkara
11.	Perwalian	1	Perkara
	JUMLAH	55	Perkara

Berikut Data grafiknya Perkara Tahun 2019

Grafik. 1. Jenis dan Jumlah perkara yang diterima PA. Maumere



d. Sisa Perkara tahun 2019 sebanyak 3 Perkara

Adapun rincian sisa perkara Tahun 2019 dapat dilihat dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel . 5. Jenis dan Jumlah Sisa Perkara PA. Maumere Tahun 2019

No	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Jumlah
1	23/Pdt.G/2019/PA.Mur.	Cerai Talak	1 Perkara
2	26/Pdt.G/2019/PA.Mur.	Cerai Talak	1 Perkara
3	28/Pdt.G/2019/PA.Mur.	Cerai Talak	1 Perkara
Jumlah Perkara			3 Perkara

e. Keadaan Keuangan Perkara Sisa Tahun 2019

Berdasarkan keadaan keuangan 3 (tiga) perkara sisa dan dengan data dukung pada Aplikasi SIPP serta Aplikasi E-Kepidayaan Perkara, keadaan sisa keuangan perkara sampai pada tanggal 31 Desember 2019 dapat dilihat dalam rincian berikut :

Tabel . 6. Sisa uang Perkara PA. Maumere Tahun 2019

No	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Jumlah Sisa
1	23/Pdt.G/2019/PA.Mur.	Cerai Talak	366.000
2	26/Pdt.G/2019/PA.Mur.	Cerai Talak	203.500
3	28/Pdt.G/2019/PA.Mur.	Cerai Talak	366.000
Jumlah Perkara			935.500

f. Pengelolaan Biaya Proses

Pengelolaan biaya proses Tahun 2019 berdasarkan jumlah penerimaan perkara dan data base Komdanas biaya perkara dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel . 7. Penerimaan dan pengeluaran Biaya proses PA. Maumere Tahun 2019

No	Bulan	Penerimaan	Pengeluaran	Sisa
1	Januari	350.000	350.000	0
2	Februari	400.000	400.000	0
3	Maret	50.000	50.000	0
4	April	200.000	200.000	0
5	Mei	100.000	100.000	0

6	Juni	550.000	550.000	0
7	Juli	600.000	600.000	0
8	Agustus	150.000	150.000	0
9	September	0	0	0
10	Oktober	150.000	150.000	0
11	November	200.000	200.000	0
12	Desember	0	0	0
Jumlah		2.750.000	2.750.000	0

- **Keadaan Perkara Tingkat Banding**

Keadaan perkara tingkat Banding merupakan keadaan perkara di Pengadilan Agama Maumere yang melakukan upaya Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur;

Keadaan Perkara Pengadilan Agama Maumere yang Mengajukan banding pada Tahun 2019 dapat dilihat pada rincian sebagai berikut :

- a. Sisa perkara Banding tahun 2018 : 0 Perkara
- b. Perkara Banding masuk tahun 2019 : 0 Perkara
- c. Perkara Banding yang diputus tahun 2019 : 0 Perkara
- d. Sisa Perkara Banding tahun 2019 : 0 Perkara

Tabel . 8. Jenis dan Jumlah Perkara Banding PA. Maumere

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	
1.	Cerai Gugat	0	Perkara
2.	Cerai Talak	0	Perkara
3.	Itsbat Nikah	0	Perkara
4.	Izin Poligami	0	Perkara
5.	Gugat Waris	0	Perkara
6.	Harta Bersama	0	Perkara
7.	Penetapan Ahli Waris	0	Perkara
8.	Dispensasi Nikah	0	Perkara
9.	Pembatalan Nikah	0	Perkara

10.	Hadhanah	0	Perkara
11.	Perwalian	0	Perkara
	JUMLAH	0	Perkara

- **Keadaan Perkara Tingkat Kasasi**

Keadaan perkara tingkat kasasi merupakan keadaan perkara di Pengadilan Agama Maumere yang melakukan upaya Kasasi di Mahkamah Agung;

Keadaan Perkara Pengadilan Agama Maumere yang Mengajukan Kasasi pada Tahun 2019 dapat dilihat pada rincian sebagai berikut :

- a. Sisa perkara Kasasi tahun 2018 : 0 Perkara
- b. Perkara Kasasi masuk tahun 2019 : 0 Perkara
- c. Perkara Kasasi yang diputus tahun 2019 : 0 Perkara
- d. Sisa Perkara Banding tahun 2019 : 0 Perkara

Tabel . 9. Jenis dan Jumlah Perkara Kasasi PA. Maumere

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	
1.	Cerai Gugat	0	Perkara
2.	Cerai Talak	0	Perkara
3.	Itsbat Nikah	0	Perkara
4.	Izin Poligami	0	Perkara
5.	Gugat Waris	0	Perkara
6.	Harta Bersama	0	Perkara
7.	Penetapan Ahli Waris	0	Perkara
8.	Dispensasi Nikah	0	Perkara
9.	Pembatalan Nikah	0	Perkara
10.	Hadhanah	0	Perkara
11.	Perwalian	0	Perkara
	JUMLAH	0	Perkara

- **Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali (PK)**

Keadaan perkara tingkat Peninjauan Kembali (PK) merupakan keadaan perkara di Pengadilan Agama Maumere yang melakukan upaya Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung yang dengan adanya bukti-bukti baru yang diajukan yang memenuhi legal Standing pelaksanaan Peninjauan Kembali (PK).

Keadaan Perkara Pengadilan Agama Maumere yang Mengajukan Peninjauan Kembali (PK) pada Tahun 2019 dapat dilihat pada rincian sebagai berikut :

- a. Sisa perkara PK tahun 2018 : 0 Perkara
- b. Perkara PK masuk tahun 2019 : 0 Perkara
- c. Perkara PK yang diputus tahun 2019 : 0 Perkara
- d. Sisa Perkara PK tahun 2019 : 0 Perkara

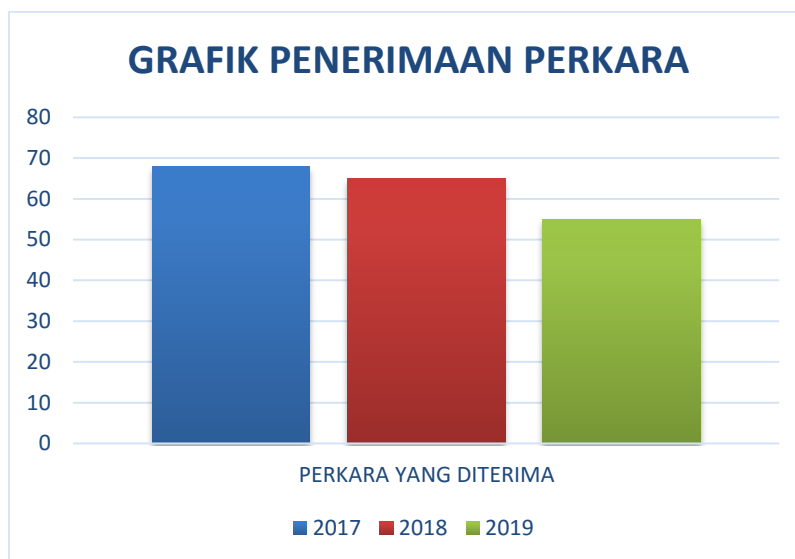
Tabel .10. Jenis dan Jumlah Perkara Kasasi PA. Maumere

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	
1.	Cerai Gugat	0	Perkara
2.	Cerai Talak	0	Perkara
3.	Itsbat Nikah	0	Perkara
4.	Izin Poligami	0	Perkara
5.	Gugat Waris	0	Perkara
6.	Harta Bersama	0	Perkara
7.	Penetapan Ahli Waris	0	Perkara
8.	Dispensasi Nikah	0	Perkara
9.	Pembatalan Nikah	0	Perkara
10.	Hadhanah	0	Perkara
11.	Perwalian	0	Perkara
	JUMLAH	0	Perkara

B. Penyelesaian Perkara

Keadaan penerimaan perkara pada Pengadilan Agama Maumere untuk tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan dengan penerimaan perkara pada tahun 2018 maupun 2017. Untuk tahun 2017 jumlah perkara yang diterima adalah 68, pada tahun 2018 jumlah perkara yang diterima adalah 65, dan untuk tahun 2019 jumlah perkara yang diterima adalah 55. Berikut kami tampilkan grafik perkara yang diterima Pengadilan Agama Maumere dari tahun 2017 sampai dengan 2019:

Grafik 2 . Penerimaan Perkara PA. Maumere 3 Tahun terakhir



- Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

Kondisi jumlah sisa Perkara yang diputus pada Pengadilan Agama Maumere dalam tahun 2019 :

- Sisa perkara tahun 2018 : 12 Perkara
- Sisa Perkara yang diputus tahun 2019 : 12 Perkara

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel . 11. Jenis dan Jumlah Sisa perkara yang diputus Tahun 2019

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	
1.	Cerai Gugat	8	Perkara
2.	Cerai Talak	1	Perkara
3.	Itsbat Nikah	1	Perkara
4.	Izin Poligami	0	Perkara

5.	Gugat Waris	0	Perkara
6.	Harta Bersama	0	Perkara
7.	Penetapan Ahli Waris	0	Perkara
8.	Dispensasi Nikah	2	Perkara
9.	Pembatalan Nikah	0	Perkara
10.	Hadhanah	0	Perkara
11.	Perwalian	0	Perkara
	JUMLAH	12	Perkara

- **Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu**

Batas waktu penyelesaian perkara pada tingkat pertama mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014, dan pada Tahun 2019 Pengadilan Agama Maumere telah memutus Perkara sebanyak 64 perkara dengan rincian sisa perkara Tahun 2018 sebanyak 12 Perkara dan Perkara Yang diterima Tahun 2019 sebanyak 52 Perkara.

Tabel . 12. Jenis dan Jumlah Perkara yang dipurus tepat waktu Tahun 2019

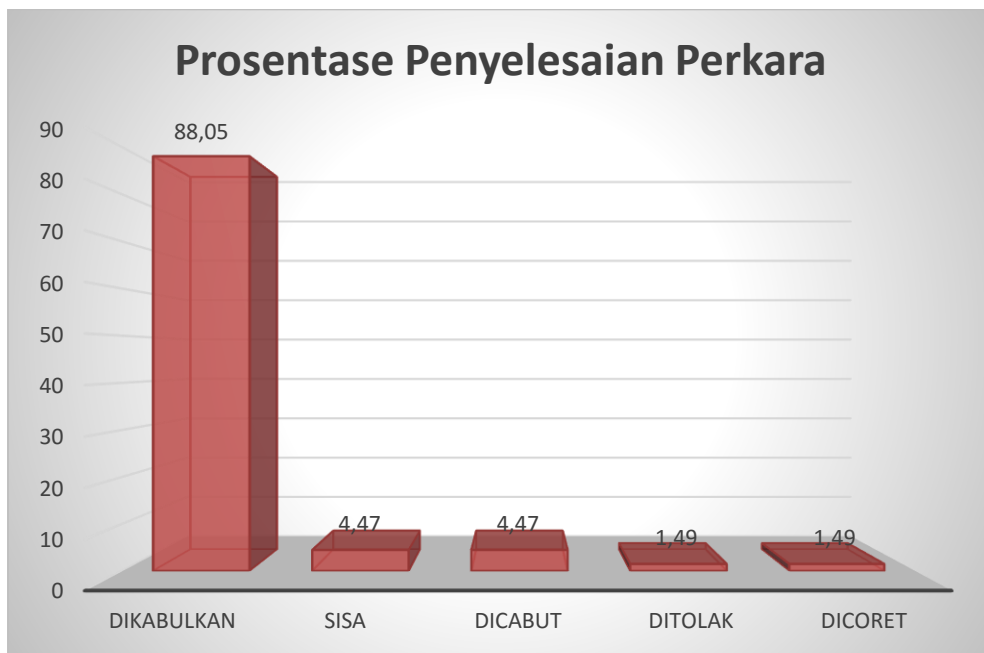
No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	
1.	Cerai Gugat	26	Perkara
2.	Cerai Talak	7	Perkara
3.	Itsbat Nikah	24	Perkara
4.	Izin Poligami	1	Perkara
5.	Gugat Waris	-	Perkara
6.	Harta Bersama	-	Perkara
7.	Penetapan Ahli Waris	-	Perkara
8.	Dispensasi Nikah	5	Perkara
9.	Pembatalan Nikah	-	Perkara
10.	Hadhanah	-	Perkara
11.	Perwalian	1	Perkara
	JUMLAH	64	Perkara

Penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Maumere dalam tahun 2019 dalam prosentase adalah seperti tabel berikut ini :

Tabel . 13. Prosentase penyelesaian Perkara PA. Maumere

TH. 2019	DITERIMA		PUTUS	DICABUT	DITOLAK	DICORET	GUGUR	SISA	PROSENTASE PENYELESAIAN
	SISA 2018	JUMLAH							
55	12	67	59	3	1	1	-	3	95,52 %

Grafik 3. Prosentase penyelesaian Perkara PA. Maumere



Jumlah perkara Gugatan yang putus selama Tahun 2019 adalah 34 perkara. Adapun Penyebab terjadinya perceraian tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :

- | | | |
|----------------------------------|---|-----------|
| a. Zina | : | - Perkara |
| b. Mabuk | : | 1 Perkara |
| c. Madat | : | - Perkara |
| d. Judi | : | - Perkara |
| e. Meninggalkan Salah Satu Pihak | : | 8 Perkara |
| f. Dihukum Penjara | : | - Perkara |
| g. Poligami | : | - Perkara |

h. KDRT	:	- Perkara
i. Cacat Badan	:	- Perkara
j. Perselisihan Terus Menerus	:	20 Perkara
k. Kawin Paksa	:	- Perkara
l. Murtad	:	- Perkara
m. Ekonomi	:	1 Perkara
n. Cabut	:	3 Perkara
o. Coret	:	1 Perkara
Jumlah	:	34 Perkara

- **Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK)**

Perkara Pada Pengadilan Agama Maumere yang putus sampai dengan bulan Desember 2019 sebanyak 64 Perkara dengan rincian sebagai berikut :

Tabel . 14. Perkara yang tidak mengajukan upaya Banding, Kasasi, PK, PA. Maumere

No	Jenis Perkara Putus	Jumlah	
1	Kabul	59	Perkara
2	Coret	1	Perkara
3	Tolak	1	Perkara
4	Cabut	3	Perkara
Jumlah Perkara		64	Perkara

Dari seluruh perkara yang telah diputus tidak ada pihak yang mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK. Dengan kata lain semua perkara pada Pengadilan Agama Maumere sampai dengan Desember 2019 tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi maupun PK.

- **Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil di Mediasi**

Mediasi pada Pengadilan Agama Maumere untuk tahun 2019 dapat dilihat dalam rincian tabel berikut :

Tabel . 15. Hasil Mediasi Perkara PA. Maumere

No	Hasil Mediasi	Jumlah	
1	Berhasil	-	Perkara
2	Tidak Berhasil	10	Perkara
3	Gagal	-	Perkara
4	Damai	-	Perkara
5	Masih Dalam Proses	-	Perkara
Jumlah Perkara		10	Perkara

C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi Iso Pengadilan)

Pengadilan Agama Maumere adalah salah satu satuan kerja tingkat pertama yang telah melaksanakan program Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) yang dulunya adalah (SAPM), dan mendapatkan hasil penilaian dengan predikat **"A" Excellent** yang penyerahan sertifikatnya di Serahkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 12-14 Juli 2018 di Hotel Novotel, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur.

Gambar 7. Foto Penyerahan Sertifikat APM Pengadilan Agama Maumere



Kemudian berdasarkan hasil rapat Pimpinan Mahkamah Agung RI disepakati perlunya penyeragaman pemberlakuan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) di 4 (empat) badan peradilan, maka menjawab sebuah perubahan tersebut Badan Peradilan Agama mengambil langkah cepat sebagai tindak lanjut dengan mengeluarkan Surat Direktur Badan peradilan Agama Nomor :

2918/DJA/OT.01.3/10/2019 Tanggal 24 Oktober 2018 perihal Pemberlakuan Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Badan Peradilan Agama. Ketua Pengadilan Agama Maumere juga tidak ketinggalan dalam mewujudkan perubahan dengan mengambil langkah revisi Surat Keputusan Nomor : W23-A9/76/OT.01.3/1/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penunjukan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Maumere tahun 2019 dengan susunan sebagai berikut :

Tabel. 16. Susunan Tim APM Pengadilan Agama Maumere Tahun 2019

NO	NAMA / NIP	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1	2	4	5
1	Awaluddin, S.H.I.,M.H. 19641231.199303.1.052	Ketua	Top Manajemen
2	Sriyani HN, S.Ag, M.H. 19721231.200112.2.003	Wakil Ketua	Ketua APM
3	Drs. Yacub, M.H. 19660718.199903.1.001	Panitera	Sekretaris Akreditasi
4	Rakimin Syarif, S.Ag. 19670531.199603.1.001	Sekretaris	Sekretaris Akreditasi
5	Ahmad Imron, S.H.I., M.H. 19780427.200604.1.004	Hakim Pratama Madya	Koordinator Asessor Internal
6	Sriyani HN, S.Ag, M.H. 19721231.200112.2.003	Wakil Ketua	Anggota
7	Drs. Yacub, M.H. 19660718.199903.1.001	Panitera	Koordinator Pengendali Dokumen Kontrol Kepaniteraan
8	Abdullah, S.H, M.H 19700608.200312.1.002	Panmud Hukum	Anggota
9	Yuhermi Natar, B.A. 19600708.199203.2.001	Panmud Gugatan	Anggota

10	Tomi Pramana Putra, S.H. 19860623.201212.1.003	Kasir Perkara	Anggota
11	Moch. Idris Djaswas, S.Kom. M.H. 19811217.201101.1.003	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Anggota
12	Hamzah Usman 19741102.201408.1.002	Jurusita Pengganti	Anggota
13	Moh. Ikram Muslimin, S.E. -	Pramubhakti	Anggota
14	Ika Asti Hana, S.E. -	Pramubhakti	Anggota
15	Arif Budi Satriawan, S.ST. -	Sopir	Anggota
16	Rakimin Syarif, S.Ag. 19670531.199603.1.001	Sekretaris	Koordinator Pengendali Dokumen Kontrol Kesekretariatan Sekretaris
17	Fakar Nur Halim, S.Kom. 19880918.201503.1.002	Kasubag Umum dan Keuangan	Anggota
18	Moch. Idris Djaswas, S.Kom. M.H. 19811217.201101.1.003	Kasubbag Perencana, TI, dan Pelaporan	Anggota
19	Tomi Pramana Putra, S.H. 19860623.201212.1.003	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Anggota
20	Hamzah Usman 19741102.201408.1.002	Staf Keuangan / Bendahara	Anggota
21	Saudah Yahya, S.H.I -	Pramubhakti	Anggota
22	Mohammad Fauzi Lanjar -	Sopir	Anggota
23	Nasarudin U Mau -	Satpam	Anggota

24	Ahmad Imron, S.H.I.,M.H. 19780427.200604.1.004	Hakim Pratama Madya	Koordinator Survey Kepuasan Masyarakat
25	Abdullah, S.H, M.H 19700608.200312.1.002	Panmud Hukum	Sekretaris
26	Drs. Yacub, M.H. 19660718.199903.1.001	Panitera	Anggota
27	Yuhermi Natar, BA. 19600708.199203.2.001	Panmud Gugatan	Anggota
28	Tomi Pramana Putra, S.H. 19860623.201212.1.003	Kasir	Anggota
29	Moch. Idris Djawas, S.Kom. M.H. 19811217.201101.1.003	Jurusita Pengganti	Anggota
30	Hamzah Usman 19741102.201408.1.002	Jurusita Pengganti	Anggota

- **Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM/Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum)**

Pos Bantuan Hukum adalah layanan yang dibentuk oleh Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Maumere yang bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sinar Keadilan Kabupaten Sikka–Maumere, sebagaimana yang tertuang dalam *Memorandum Of Understanding (MOU)* Nomor : W23-A9/273/OT.01.3/2/2019 tanggal 18 Februari 2019 dalam rangka pemerataan akan akses dan pelayanan peradilan bagi masyarakat pencari keadilan yang kurang mampu (*Justice For All*),

maka disusunlah suatu program pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu dengan pembiayaan oleh Negara.

Dalam tahun 2019 Pengadilan Agama Maumere mendapatkan alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Jasa Layanan Bantuan Hukum sebesar Rp. 24.000.000,- dan telah merealisasikan pelaksanaan Pos Layanan Hukum /Posbakum dengan jumlah jam pelayanan sebanyak 392 jam layanan dengan biaya sebesar Rp. 24.000.000,- (*Dua puluh empat juta rupiah*) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 0 (Nihil). Dalam hal ini capaian pelaksanaan realisasi Pos Layanan Hukum/Posbakum sebesar 100%.

- **Sidang Keliling /Pelayanan Terpadu**

Pelaksanaan Sidang keliling dengan pelayanan terpadu belum dapat dilaksanakan karena berdasarkan hasil koordinasi dari instansi terkait (Dinas Dukcapil Kab. Sikka dan Kantor Kementerian Agama Kab. Sikka) masih mempunyai kegiatan yang padat, sehingga pada tahun 2019 Pengadilan Agama Maumere hanya melaksanakan Sidang Keliling Insidentil dengan jumlah sebanyak 18 perkara dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------|------------|
| a. Perkara Cerai Gugat sebanyak | 1 perkara |
| b. Perkara Cerai Talak sebanyak | 0 perkara |
| c. Perkara Isbat Nikah sebanyak | 17 perkara |
| d. Perkara putus sebanyak | 18 perkara |
| e. Perkara digugurkan sebanyak | 0 perkara |

Pada tahun 2019 ini, sidang keliling dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, 2 (dua) kali di wilayah kepulauan dan 1 (satu) kali di wilayah daratan dengan rincian lokasinya sebagai berikut :

- Sidang keliling Gel. I bertempat di Dusun Ngolo, Desa Gunung Sari, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, sebanyak 7 perkara.
- Sidang keliling Gel. II bertempat di Dusun Ngolo Desa Gunung Sari, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, sebanyak 10 perkara. dan

- c. Sidang keliling Gel. III, bertempat di Kantor KUA, Desa Nangahale Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, sebanyak 1 perkara.

Gambar. 8. Foto Kegiatan Sidang Keliling Desa Gunungsari Gel. I PA. Maumere



Gambar. 9. Foto Kegiatan Sidang Keliling Desa Gunungsari Gel. II PA. Maumere



Gambar. 10. Foto Kegiatan Sidang Keliling Desa Nangahale Gel. III PA. Maumere



- **Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)**

Perkara Prodeo merupakan perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Maumere yang beban biaya perkaranya ditanggung oleh Negara, sesuai alokasi anggaran yang ditetapkan dalam DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun 2019, yang syarat untuk mendapatkan layanan prodeo dari Pengadilan Agama Maumere dengan melampirkan Surat Permohonan berperkara secara Prodeo, Fc. Kartu Tanda Penduduk/Domisili dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)/ Kartu Indonesia Sehat maupun kartu lainnya yang menyatakan warga miskin sebagaimana amanah dalam Perma Nomor 1 Tahun 2014.

Untuk Tahun 2019 jumlah perkara prodeo yang diterima oleh Pengadilan Agama Maumere adalah sebanyak 29 perkara dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------|------------|
| a. Perkara Cerai Talak sebanyak | 2 perkara |
| b. Perkara Cerai Gugat sebanyak | 6 perkara |
| c. Perkara Isbat Nikah sebanyak | 21 perkara |
| d. Perkara putus sebanyak | 29 perkara |
| e. Perkara digugurkan sebanyak | 0 perkara |
| f. Sisa | 0 perkara. |

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

❖ **Komposisi Sumber Daya Manusia**

Gambar 11. Foto SDM aparatur PA. Maumere



Kedudukan dan peranan Sumber Daya Manusia (SDM) sangat penting, dimana Aparatur Peradilan sebagai SDM memegang peranan yang penting dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan dan roda pembangunan dalam rangka

mencapai tujuan *Good Government*. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (Aparatur Peradilan Agama) yang ada diharapkan agar dapat melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang peradilan. Sehingga SDM yang efektif dan efisien merupakan aset berharga bagi institusi, sebagai salah satu pendukung manajemen SDM yang lebih baik, mekanisme pembinaan karir disempurnakan dengan menjadikan penilaian berbasis kinerja sebagai komponen utama. Hal ini untuk memacu setiap Sumber Daya Manusia dalam menunjukkan kinerja terbaiknya bagi institusi. Sejalan dengan arahan Reformasi Birokrasi, Pengadilan Agama Maumere telah mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen Sumber Daya Manusia berbasis kompetensi.

Dalam memperoleh Sumber Daya Manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, terintegrasi dan profesional, Pengadilan Agama Maumere telah melaksanakan Pembinaan internal untuk pegawai Pengadilan Agama Maumere dengan dilaksanakan apel pagi setiap hari Senin dan apel sore setiap hari Jum'at, rapat bulanan secara berkala juga mengikutsertakan pegawai pada kegiatan-kegiatan

Diklat, Sosialisasi, Pelatihan/Bimbingan Teknis Yustisial maupun Tata kelola keuangan Diklat di Tempat Kerja (DDTK) itu sendiri. Orientasi-orientasi dan Pembinaan Sumber Daya Manusia tersebut semakin lebih ditingkatkan khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya aparatur maupun dalam peningkatan pelayanan bagi para pencari keadilan seperti Implementasi Pelayanan PTSP dengan prinsip 3 S (Senyum, salam, sapa) dan 5 (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin), maupun sosialisasi implementasi 9 (sembilan) aplikasi unggulan Badan Peradilan Agama yang kegiatannya diikuti oleh seluruh aparatur Pengadilan Agama Maumere secara berkelanjutan, dengan tujuan meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur Peradilan Agama di lingkungan Pengadilan Agama Maumere dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pengadilan Agama Maumere.

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Pengadilan Agama Maumere per 31 Desember 2019 adalah 13 Pegawai, lebih rinci keadaanya dapat dilihat dari paparan tabel sebagai berikut :

Tabel. 17. Bagan nama –nama Pegawai Pengadilan Agama Maumere

No	Nama	Jabatan	Pangkat/ Gol. Ruang
1	Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.	Ketua	Pembina, IV/a
2	Suratnah Bao, S.Ag., M.H.	Wakil Ketua	Penata Tk.I, III/d
3	Isyhad Wira Budiawan, S.H.I., M.S.I.	Hakim Pratama Madya	Penata, III/c
4	Drs. Yacub, M.H.	Panitera	Pembina, IV/a
5	Rakimin Syarif, S.Ag.	Sekretaris	Penata Tk. I, III/d
6	Yuhermi Natar, B.A.	Panitera Muda Gugatan	Penata, III/c
7	Abdullah, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum	Penata Tk. I, III/d

8	Moch. Idris Djasas., S.Kom. M.H.	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Penata, III/c
9	Tomi Pramana Putra, S.H.	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Penata Muda, Tk.I, III/b
10	Fakar Nur Halim, S.Kom.	Kasubbag Umum dan Keuangan	Penata Muda, Tk.I, III/b
11	Sigit Apriluberta, S.H.	Panitera Pengganti	Penata Muda, Tk.I, III/b
12	Fauzy Arizona, S.Sy.	Pns/Cakim	Penata Muda, III/a
13	Hamzah Usman	Jurusita	Pengatur Muda Tk.I, II/b

Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Maumere berdasarkan penggolongan Yudisial adalah sebagai berikut :

- **Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial**

Sumber Daya Manusia (SDM) Teknis Yudisial pada Pengadilan Agama Maumere terdiri dari :

a. 3 orang Hakim, dengan uraian sebagai berikut :

- 1) 1 Orang Ketua
- 2) 1 Orang Wakil Ketua
- 3) 1 Orang Hakim

b. 4 Orang Panitera/Panitera Muda dan Panitera Pengganti, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) 1 Orang Panitera
- 2) 1 Orang Panitera Muda Gugatan
- 3) 1 Orang Panitera Muda Hukum
- 4) 1 Orang Panitera Pengganti

c. 1 Orang Jusrita.

- **Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial**

Sumber daya manusia Non Teknis Yudisial Pengadilan Agama Maumere tahun 2019 terdiri dari :

- a. 1 Orang Sekretaris ;
- b. 1 Orang Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan ;
- c. 1 Orang Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana ;
- d. 1 Orang Kasubbag Umum dan Keuangan ;
- e. 1 orang Bendahara di Perbantuan (merangkap jabatan Jusurita)
- f. 1 orang Pns/Cakim (Yang sementara mengikuti Magang di PA. Sumedang)
- g. Semua kelompok jabatan fungsional Kesekretariatan (Bendaharawan, Pranata Komputer, Arsiparis, dan Pustakawan) masih mengalami kekosongan sejak Tanggal 28 Desember 2015 sampai saat ini;

Dalam menjalankan pelaksanaan tupoksi Pengadilan Agama Maumere disamping Sumber Daya Manusia (SDM) Teknis dan Non Teknis Yudisial, juga dibantu dengan tenaga kontrak yang sumber pembiayaannya berasal dari Daftar Isian Pengelolaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Maumere Tahun Anggaran 2019 yang berjumlah 6 orang yang terdiri dari :

- b. Pegawai Honorer/Pramubhakti 3 orang;
- c. Pegawai Honorer/Pengamanan Sidang 1 orang; dan
- d. Pegawai Honorer/Sopir 2 orang.

yang di perbantuan 3 orang di bidang Kesekretariatan dan 2 orang di bidang Kepaniteraan.

Adapun Sumber Daya Manusia (SDM) Tenaga Honorer/Pramubhakti lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel . 18. Daftar Nama Tenaga Honorer/Pramubhakti PA. Maumere

No	Nama	Tahun Masuk/ Pendidikan	Jabatan Tugas	Tugas Tambahan	Jumlah
1	Saudah Yahya, S.H.I.	2001 S.1	Pramubhakti	Staf Umum (Operator Aplikasi Surat dan Petugas	1

				Kearsipan Bidang Kesekretariatan)	
2	M. Ikram Muslimin, S.E.	10 Tahun, S.1	Pramubhakti	Staf Kepaniteraan (Admin SIPP)	1
3	Nasarudin U Mau	2010 SMA	Satpam	Pengamanan Kantor dan Pengamanan Sidang	1
4	Ika Asti Hana, S.E.	2012, S.1	Pramubhakti	Staf Kepaniteraan Penulis Register dan Buku Induk Keuangan	1
5	Muhammad Fauzi Lanjar	2013 SMA	Sopir	Staf Kepegawaian (Operator SIKEP MARI dan ABS Badilag)	1
6	Arif Budi Satriawan, S.ST.	2018, S.1	Sopir	Staf Kepaniteraan (Admin Direktori Putusan dan SIPP) serta Pengamanan Sidang	1
	JUMLAH				6

- Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang;
Keadaan pegawai Pengadilan Agama Maumere menurut jenjang pangkat/golongan ruang dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel . 19. Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Pangkat/Golongan ruang

No	Pangkat	Golongan Ruang	Jumlah
1	Pembina	IV, a	2 Orang
2	Penata Tk. I	III/d	3 Orang
3	Penata	III/c	3 Orang
4	Penata Muda Tk. I	III/b	3 Orang
5	Penata Muda	III/a	1 Orang
6	Pengatur Muda Tk. I	II/b	1 Orang

- Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan jejang pendidikan;

Keadaan pegawai Pengadilan Agama Maumere menurut jenjang pendidikan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel . 20. Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	S. 2	6 Orang
2	S. 1	5 Orang
3	D III	1 Orang
4	SMA / Madrasah Aliyah	1 Orang

- Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan jenis Kelamin;

Keadaan pegawai Pengadilan Agama Maumere menurut jenjang jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel . 21. Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	11 Orang
2	Perempuan	2 Orang

- Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan Usia;

Keadaan pegawai Pengadilan Agama Maumere menurut jenjang Usia dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel . 22. Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Usia

No	Usia	Jumlah
1	22 s.d. 29	0 Orang
2	30 s.d. 39	6 Orang
3	40 s.d. 49	4 Orang
4	50 s.d. 59	3 Orang
5	60 s.d. 66	0 Orang

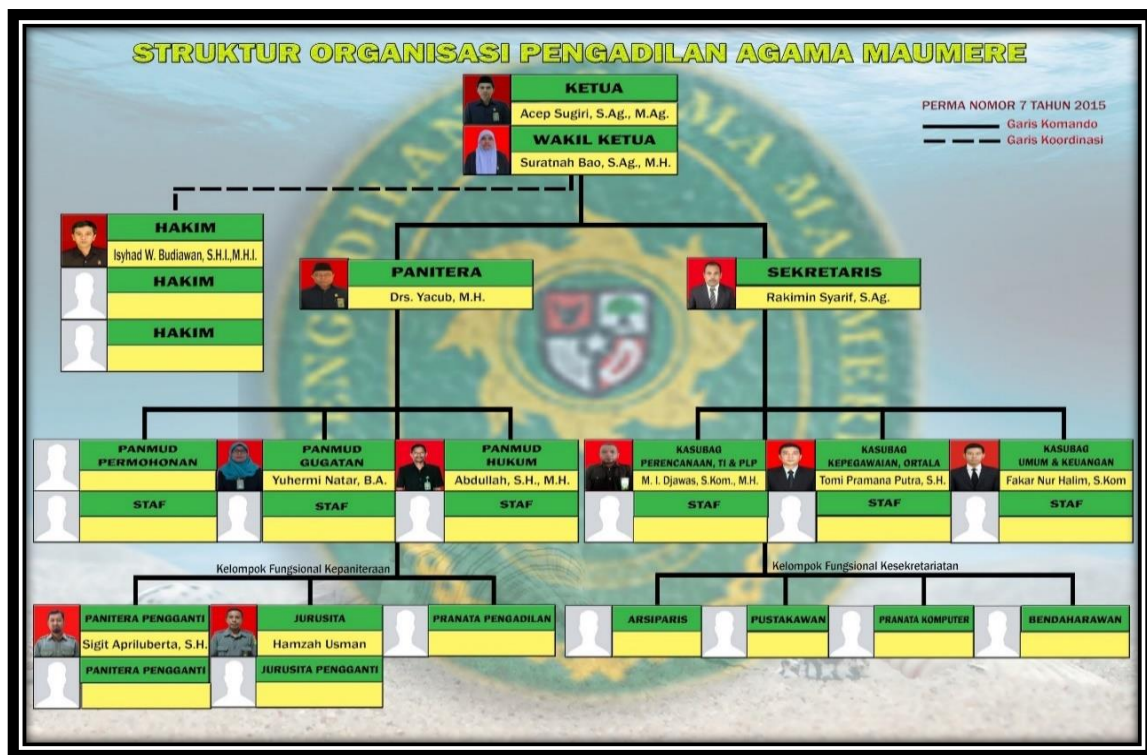
❖ Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Maumere telah mempedomani Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua sebagai Pimpinan yang membawahi para Hakim sebagai pejabat fungsional dalam mengadili dan memutus perkara yang diajukan, dan selanjutnya ada 2 (dua) yaitu bidang pertama yaitu Kepaniteraan yang dipimpin oleh Panitera yang membawahi Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Hukum serta Jabatan Fungsional kepaniteraan yaitu Panitera Pengganti, Jurusita/jurusita Pengganti dan Pranata Peradilan. Kemudian bidang kedua yaitu Kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris dan membawahi Kasubbag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kasubbag Kepegawaian dan Ortala, Kasubbag Umum dan Keuangan, serta Jabatan fungsional Kesekretariatan yaitu Fungsional Bendahara, Pranata Komputer, Arsiparis, dan Pustakawan.

Secara umum stuktur organisasi Pengadilan Agama Maumere menggambarkan suatu susunan dan hubungan kerja baik secara komando maupun kordinasi tiap bagian yang pemisahannya berdasarkan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan.

Adapun Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Maumere tahun 2019 sebagai berikut :

Gambar. 12. Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Maumere



Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana kewenangan Pengadilan Agama Maumere tersebut diatas, Pengadilan Agama Maumere membagi tugas para pejabat dilingkungan satuan kerja sebagai berikut:

1. Ketua

Ketua Pengadilan Agama Maumere (Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag) mempunyai tugas pokok dan fungsi merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Maumere serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan teknis Direktur Jenderal badan Peradilan Agama serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa mengingat Pengadilan Agama Maumere di Tahun 2019 mengalami Mutasi dan Promosi Ketua dimana Ketua Pengadilan Agama Maumere yang mutasi (Awaluddin, S.H.I., M.H) menjabat sejak bulan Juli tahun 2017 s.d pertengahan bulan Mei 2019 dan dilanjutkan dengan Ketua Pengadilan Agama Maumere yang saat ini (Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag) menjabat sejak 14 Mei 2019 sampai sekarang. Lebih rinci dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 23. Bagan nama Ketua Pengadilan Agama Maumere

No	Nama Pejabat	Jabatan	TMT Jabatan	Ket
1	Awaluddin, S.H.I., M.H.	Ketua	20 Juli 2017 s.d. 13 Mei 2019	Mutasi
2	Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.	Ketua	14 Mei 2019 s.d. Sekarang	Aktif

2. Wakil Ketua

Wakil Ketua Pengadilan Agama Maumere (Suratnah Bao, S.Ag., M.H) mempunyai tugas dan fungsi mewakili Ketua Pengadilan Agama Maumere dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Maumere serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan teknis Direktorat Jenderal badan Peradilan Agama serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Wakil Ketua Pengadilan Agama Maumere di Tahun 2019 mengalami Mutasi dan Promosi dimana Wakil Ketua Pengadilan Agama Maumere yang lama (Sriyani HN, S.Ag., M.H) menjabat sejak bulan Oktober tahun 2016 s.d pertengahan bulan Maret 2019 dan dilanjutkan dengan Wakil Ketua yang saat ini (Suratnah Bao, S.Ag., M.H) menjabat sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai sekarang. Dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel. 24. Bagan nama Wakil Ketua Pengadilan Agama Maumere

No	Nama Pejabat	Jabatan	TMT Jabatan	Ket
1	Sriyani HN, S.Ag., M.H	Wakil	01 Oktober 2016 s.d. 27 Maret 2019	Mutasi
2	Suratnah Bao, S.Ag., M.H	Wakil	14 Mei 2019 s.d. Sekarang	Aktif

3. Hakim

Hakim Pengadilan Agama Maumere mempunyai tugas dan fungsi untuk meneliti dan mencatat berkas perkara yang diterima, menentukan hari sidang (Hakim Tunggal), menyidangkan perkara, memuat putusan/penetapan, mengevaluasi dan menyelesaikan perkara yang ditangani serta melaksanakan tugas khusus dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Agama Maumere.

Hakim Pengadilan Agama Maumere dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 25. Bagan nama Hakim Pengadilan Agama Maumere

No	Nama	GOL.	TMT Hakim	Masa Kerja	Ket
1	Suratnah Bao, S.Ag., M.H	III/d	29-07-2009	10 Tahun 05 Bulan	Aktif
2	Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.	IV/a	01-08-2009	10 Tahun 04 Bulan	Aktif
3	Isyhad Wira budiawan, S.H.I. M.S.I.	III/c	30-09-2014	05 Tahun 03 Bulan	Aktif

4. Panitera

Panitera Pengadilan Agama Maumere (Drs. Yacub, M.H) bertugas dan bertanggung jawab memberikan pelayanan teknis dibidang administrasi kepaniteraan, administrasi perkara dan administrasi peradilan lainnya dilingkungan Pengadilan Agama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, membawahi Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti.

5. Panitera Muda

a. Panitera Muda Hukum

Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Maumere (Abdullah, S.H., M.H) bertugas mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data perkara, menyajikan statistik data perkara, menyusun/membuat laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, dan melakukan pengurusan administrasi, pemberian keterangan dan mengkoordinir, memasukkan data perkara, anonimasi perkara yang putus dan berkekuatan hukum tetap serta tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Panitera Muda Gugatan

Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Maumere (Yuhermi Natar, B.A) bertugas dan bertanggung jawab atas jalannya administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara gugatan.

c. Panitera Muda Permohonan

Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Maumere (Plt. Yuhermi Natar, B.A) bertugas dan bertanggung jawab atas jalannya administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara permohonan.

6. Panitera Pengganti

Panitera Pengganti Pengadilan Agama Maumere mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan, serta membuat berita acara sidang semua peristiwa hukum yang terjadi dalam persidangan perkara Majelis Hakim/Hakim tersebut, dan juga menyelesaikan administrasi persidangan. Secara realitas jabatan Panitera pengganti yang ada di Pengadilan Agama Maumere saat ini hanya 1 (satu) orang yaitu Sigit Apriluberta, S.H. sementara 3 (tiga) orang tersebut Panitera Sidang/Panitera Pengganti merupakan jabatan merangkap yaitu sebagai Panitera (Drs. Yacub, M.H), Panitera Muda Hukum (Abdullah, S.H., M.H) dan panitera Muda Gugatan (Yuhermi Natar, B.A), keadaan panitera sidang/pengganti dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 26. Bagan nama Panitera/Panitera Pengganti Pengadilan Agama Maumere

No	Nama	GOL.	TMT Panitera Pengganti	Masa Kerja	Ket
1	Yuhermi Natar, B.A.	III/c	31-01-2003	17 Tahun 01 Bulan	Aktif
2	Drs. Yacub, M.H	IV/a	08-02-2003	17 Tahun 00 Bulan	Aktif
3	Abdullah, S.H., M.H.	III/d	04-01-2016	03 Tahun 11 Bulan	Aktif
4	Sigit Apriluberta, S.H.	III/b	01-08-2019	00 Tahun 04 Bulan	Aktif

7. Jurusita

Jurusita Pengadilan Agama Maumere (**Hamzah Usman**) mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan semua perintah yang berhubungan dengan tugas-tugas kejurusitaan antara lain Pemanggilan para pihak, menyampaikan Pengumuman, Teguran (Anmaning) melakukan penyitaan, dan membuat berita acara penyitaan

serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan atau Ketua Majelis/Hakim yang dikoordinir oleh Panitera.

8. Sekretaris (Rakimin Syarif, S.Ag)

Sekretaris Pengadilan Agama Maumere (**Rakimin Syarif, S.Ag**) mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan, membina, dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas pelayanan administrasi kepada semua unsur di Pengadilan Agama Maumere serta membawahi Kepala Sub Bagian (Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan), (Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana), (Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan), Jabatan Fungsional Kesekretariatan (Arsiparis, Pranata Komputer, Pustakawan, dan Bendahara) dan Staf Kesekretariatan.

9. Kepala Sub Bagian

a. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan Pengadilan Agama Maumere (**Moch. Idris Djawas, S.Kom., M.H.**) mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, program dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, statistik, pelaksanaan pemantauan evaluasi dan dokumentasi, serta Pelaporan.

b. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Pengadilan Agama Maumere (**Tomi Pramana Putra, S.H**) mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan Kepegawaian, Penataan organisasi dan Tata Laksana.

c. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Umum Pengadilan Agama Maumere (**Fakar Nur Halim, S.Kom.**) mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan surat menyurat, pengarsipan, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan serta pengelolaan keuangan.

- **Mutasi**

Mutasi yang merupakan salah satu hal yang selalu dilakukan untuk memenuhi hak-hak personal maupun demi kebutuhan organisasi, yang terkadang cenderung teraktualisasi sebagai *Reward* namun ada juga sebagai *Punishment*. Regulasi pengaturan mutasi baik Hakim, tenaga teknis Kepaniteraan dan Juga Tenaga Kesekretariatan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 193/KMA/SK/XI/2014 tentang Pembaharuan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Agama, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan, dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1/SEK/SK/I/2019 tentang Pola Promosi dan Mutasi Pegawai Kesekretariatan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Penggambaran secara lebih detail terdapat mutasi pegawai Pengadilan Agama Maumere dirincikan pada tabel sebagai berikut :

a. Mutasi Tempat Tugas

1. Pegawai yang mutasi masuk di Pengadilan Agama Maumere periode tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel . 27. Keadaan Pegawai yang mutasi masuk PA. Maumere

No	Nama	Jabatan		TMT	No. SK
		Lama	Baru		
1	Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.	Wakil Ketua PA. Mamuju	Ketua PA. Maumere	14 Mei 2019	74/KMA/SK/ IV/2019
2	Suratnah Bao, S.Ag., M.H.	Hakim PA. Soe	Hakim PA. Maumere	02 April 2019	48/KMA/SK/ III/2019
3	Isyhad Wira Budiawan, S.H.I.,	Hakim PA. Atambua	Hakim PA. Maumere	16 Mei 2019	74/KMA/SK/ IV/2019

	M.S.I.				
4	Sigit Apriluberta, S.H.	Jurusita Penggant PA. Denpasar	Panitera Pengganti PA. Maumere	01 Agustus 2019	2588 Tahun 2019

2. Pegawai yang mutasi keluar di Pengadilan Agama Maumere tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel . 28. Keadaan Pegawai yang mutasi Keluar PA. Maumere

N o	Nama	Jabatan		TMT	No. SK
		Lama	Baru		
1	Awaluddin, S.H.I., M.H.	Ketua PA. Maumere	Ketua PA. Giri Menang	14 Mei 2019	74/KMA/SK/I V/2019
2	Sriyani HN, S.Ag., M.H.	Wakil Ketua PA. Maumere	Ketua PA. Bajawa	27 Maret 2019	48/KMA/SK/II I/2019
3	Ahmad Imron, S.H.I., M.H.	Hakim PA. Maumere	Wakil Ketua PA. Kota Madiun	22 Mei 2019	74/KMA/SK/I V/2019

➤ **Mutasi Kenaikan Pangkat/Golongan, yaitu :**

Pegawai Pengadilan Agama Maumere yang Kenaikan Pangkat periode tahun 2019 sebanyak 2 (dua) orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel . 29. Keadaan Kenaikan Pangkat/Golongan pegawai PA. Maumere

No	Nama	Pangkat Gol. Ruang		TMT	No. SK
		Lama	Baru		
1	Moch. Idris Djawas, S.Kom., M.H	Penata Muda Tk.I, III/b	Penata, III/c	1 April 2019	W23- A/363/Kp.04.1 /III/SK/2019
2	Fakar Nur Halim, S.Kom.	Penata Muda, III/a	Penata Muda Tk.I, III/b	1 April 2019	W23- A/373/Kp.04.1 /III/SK/2019

➤ **Mutasi Kenaikan Gaji Berkala (KGB)**

Pegawai Pengadilan Agama Maumere yang Kenaikan Gaji Berkala (KGB) periode tahun 2019 sebanyak 3 (tiga) orang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel . 30. Keadaan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Pegawai PA. Maumere

N o	Nama	TMT KGB		No. SK.	Tanggal Usul
		Saat ini	YAD		
1	Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.	01 Desember 2019	01 Desember 2021	W23- A9/845/KP.04. 2/10/2019	28 Oktober 2019
2	Abdullah, S.H., M.H.	01 Desember 2019	01 Desember 2021	W23- A9/846/KP.04. 2/10/2019	28 Oktober 2019
3	Fauzy Arizona, S.Sy.	01 Desember 2019	01 Desember 2021	W23- A9/847/KP.04. 2/10/2019	28 Oktober 2019

- **Promosi**

Pegawai Pengadilan Agama Maumere yang mendapatkan Promosi periode tahun 2019 sebanyak 5 (lima) orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel . 31. Keadaan Promosi pegawai PA. Maumere

NO	NAMA	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1	Sriyani HN, S.Ag., M.H.	Pembina, IV/a	Wakil Ketua Pengadilan Agama Maumere	Ketua Pengadilan Agama Bajawa
2	Suratnah Bao, S.Ag., M.H.	Penata Tk.I, III/d	Hakim Pengadilan Agama Maumere	Wakil Ketua Pengadilan Agama Maumere
3	Ahmad Imron, S.H.I., M.H.	Penata Tk.I, III/d	Hakim Pengadilan Agama	Wakil Ketua Pengadilan

			Maumere	Agama Kota Madiun
4	Sigit Apriluberta, S.H.	Penata Muda Tk.I, III/b	Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Denpasar	Panitera Pengganti Pengadilan Agama Maumere
5	Hamzah Usman	Pengatur Muda, Tk.I, II/b	Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maumere	Jurusita Pengadilan Agama Maumere

- Pensiun

Pegawai Pengadilan Agama Maumere yang mengalami masa pensiun periode tahun 2019 tidak ada namun untuk usulan pensiun sebanyak 1 (satu) orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel . 32. Keadaan Kenaikan pangkat/Golongan pegawai PA. Maumere

No	Nama	Pangkat / gol. Ruang	Jabatan	TMT	Ket
1	2	3	4	5	
1	Yuhermi Natar, BA.	Penata, III/c	Panmud Gugatan	07 Agustus 2020	Proses Usulan

- Diklat (SDM Teknis / Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)

Dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis maupun nonteknis sumber daya manusia telah diikutsertakan dalam Pendidikan dan Pelatihan/Bimtek baik yang diadakan oleh Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tinggi Agama Nusa Tenggara Timur atau lembaga pemerintah lainnya.

Pendidikan dan Pelatihan/Bimtek yang telah diikuti oleh pegawai teknis maupun non teknis selama kurun waktu tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- Diklat SDM Teknis Pengadilan Agama Maumere Tahun 2019

Tabel . 33. Diklat SDM Teknis pegawai PA. Maumere

NO	N a m a	Nama Diklat/Bimtek	Lama/ Waktu Diklat/Bimtek	Penyelenggara
1	Fauzy Arizona, S.Sy.	Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Calon Hakim (PPC) Terpadu Angkatan I Gelombang III dan Magang di PA. Sumedang;	1 Tahun 3 Bulan 29 September 2018 s.d. 31 Desember 2019	Balitbangkumdil MARI
2	Suratnah Bao, S.Ag., M.H.	Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja dengan Komisi III DPR-RI	2 Hari	Komisi III DPR-RI
3	- Drs. Yacub, M.H. dan - Tomi Pramana Putra, S.H.	Sosialisasi E-Register dan E-Kuangan	2 hari	Pengadilan Tinggi Agama NTT

b. Diklat SDM Non Teknis Pengadilan Agama Maumere Tahun 2019

Tabel . 34. Diklat SDM Non Teknis pegawai PA. Maumere

NO	N a m a	Nama Diklat/Bimtek	Lama Diklat/Bimtek	Penyelenggara
1	Rakimin Syarif, S.Ag.,	Diklat Kepemimpinan Tk. IV Angkatan XXVI dan XXVII;	6 Bulan	Balitbang Kumdil MARI
2	- Rakimin Syarif, S.Ag., - Abdullah, S.H., M.H.	Sosialisasi Persiapan Implementasi Aplikasi SAKTI, Jabatan Fungsional, dan	1 Hari	KPPN Ende

		PER-85/PB/2011 tentang Penatausahaan Piutang PNPB pada Satuan Kerja K/L;		
3	Hamzah Usman	Ujian Sertifikasi Bendahara Periode II TA. 2019 dan Diklat Bendahara	8 hari	KPPN Ende dan Mahkamah Agung
4	<ul style="list-style-type: none"> - Rakimin Syarif, S.Ag., - Moch. Idris Djawas, D. Kom., M.H. 	Bimtek Pelaksanaan Verifikasi, Validasi dan Reviu Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK atas Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018;	4 Hari	Pengadilan Tinggi Agama NTT
5	<ul style="list-style-type: none"> - Moch. Idris Djawas, D. Kom., M.H. - Fakar Nur Halim, S.Kom. 	Rekonsiliasi Internal Data BMN dan Pegumpulan LBMN dan LK. Semester I Tahun 2019;	4 Hari	Pengadilan Tinggi Agama NTT
7	<ul style="list-style-type: none"> - Rakimin Syarif, S.Ag., - Fakar Nur Halim, S.Kom. 	Sosialisasi Langkah-langkah Pelaksanaan Pengeluaran dan Penerimaan Negara Akhir	2 Hari	KPPN Ende

		Tahun Anggaran 2019;		
8	<ul style="list-style-type: none"> - Moch. Idris Djawas, D. Kom., M.H. - Hamzah Usman 	Sosialisasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Berbasis Web Lanjutan	2 Hari	KPPN Ende
9	<ul style="list-style-type: none"> - Suratnah Bao, S.Ag., M.H. - Drs. Yacub, M.H. - Rakimin Syarif, S.Ag. 	Sosialisasi <i>Quality Assurance</i>	3 Hari	Aston Kupang Hotel dan Convention Center

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan

Pengadilan Agama Maumere pada Tahun Anggaran 2019 mengelola 2 DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), untuk Unit Organisasi (01) Badan Urusan Administrasi dengan nomor DIPA : SP DIPA-005.01.2.402851/2019 tanggal 05 Desember 2018, memiliki Pagu Awal sebesar Rp. 2.132.889.000 (*Dua Miliar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*). Sedangkan untuk Unit Organisasi (04) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dengan nomor DIPA : SP DIPA-005.04.2.402852/2019 tanggal 05 Desember 2018, memiliki Pagu Awal sebesar Rp. 63.840.000 (*Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*). Terjadi 6 kali revisi Anggaran untuk Unit Organisasi (01) Badan Urusan Administrasi dikarenakan ada beberapa kali penambahan anggaran dari DIPA BUN (Bendahara Umum Negara) sampai dengan terakhir revisi 6 pada tanggal 29 November 2019 dikarenakan terdapat minus pada belanja pegawai, sehingga Pagu Anggaran menjadi Rp. 2.320.898.000 (*Dua Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah*). Detail realisasi pagu per jenis belanja pada masing-masing unit organisasi adalah sebagai berikut :

1. Unit Organisasi (01) Badan Urusan Administrasi

a. Belanja Pegawai

Pagu belanja pegawai pada rencana kerja anggaran kementerian lembaga (RKAKL) yang dituangkan dalam DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun 2019 tanggal 05 Desember 2018 sebesar Rp. 1.503.812.000 (*Satu Miliar Lima Ratus Tiga Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Rupiah*). Belanja Pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang peruntukannya antara lain untuk gaji, tunjangan, honorarium dan

lembur. Honorarium yang berkaitan dengan pembentukan modal tidak termasuk dalam belanja pegawai. Selama satu tahun anggaran mengalami beberapa revisi, sampai dengan revisi ke-6 pada tanggal 29 November 2019 penambahan pagu anggaran dikarenakan terdapat pagu minus. Sehingga Pagu untuk belanja pegawai bertambah menjadi Rp.1.582.761.000,- (*Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah*), dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 35. Realisasi Anggaran Belanja Pegawai (dalam rupiah)

No	Jenis Belanja	DIPA Badan Urusan Administrasi (01)			
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran
			Rp	%	
1	Belanja Pegawai	1.582.761.000	1.561.805.936	98,68 %	20.955.064

b. Belanja Barang

Pagu belanja barang pada rencana kerja anggaran kementerian lembaga (RKAKL) yang dituangkan dalam DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun 2019 tanggal 05 Desember 2018 sebesar Rp. 616.077.000 (*Enam Ratus Enam Belas Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah*). Belanja barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai. Belanja ini terdiri dari belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas. Selama satu tahun anggaran mengalami beberapa revisi, sampai dengan revisi ke-5 pada tanggal 05 November 2019. Revisi tersebut adalah penambahan pagu anggaran dari Bendahara Umum Negara (BUN) untuk tambahan langganan internet dan bantuan sewa rumah hakim. Sehingga Pagu untuk belanja belanja barang bertambah menjadi Rp. 712.137.000,- (*Tujuh Ratus Dua Belas Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah*), dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 36. Realisasi Anggaran Belanja Barang (dalam rupiah)

No	Jenis Belanja	DIPA Badan Urusan Administrasi (01)			
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran
			Rp	%	
1	Belanja Barang	712.137.000	673.038.296	94,51 %	39.098.704

c. Belanja Modal

Pagu belanja barang pada rencana kerja anggaran kementerian lembaga (RKAKL) yang dituangkan dalam DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun 2019 tanggal 05 Desember 2018 sebesar Rp. 13.000.000 (*Tiga Belas Juta Rupiah*). Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Selama satu tahun anggaran mengalami beberapa revisi, sampai dengan revisi ke-5 pada tanggal 05 November 2019 yaitu penambahan pagu anggaran dari Bendahara Umum Negara (BUN). Sehingga Pagu untuk belanja operasional dan pemeliharaan kantor bertambah menjadi Rp. 26.000.000,- (*Dua Puluh Enam Juta Rupiah*), dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 37. Realisasi Anggaran Belanja Modal (dalam rupiah)

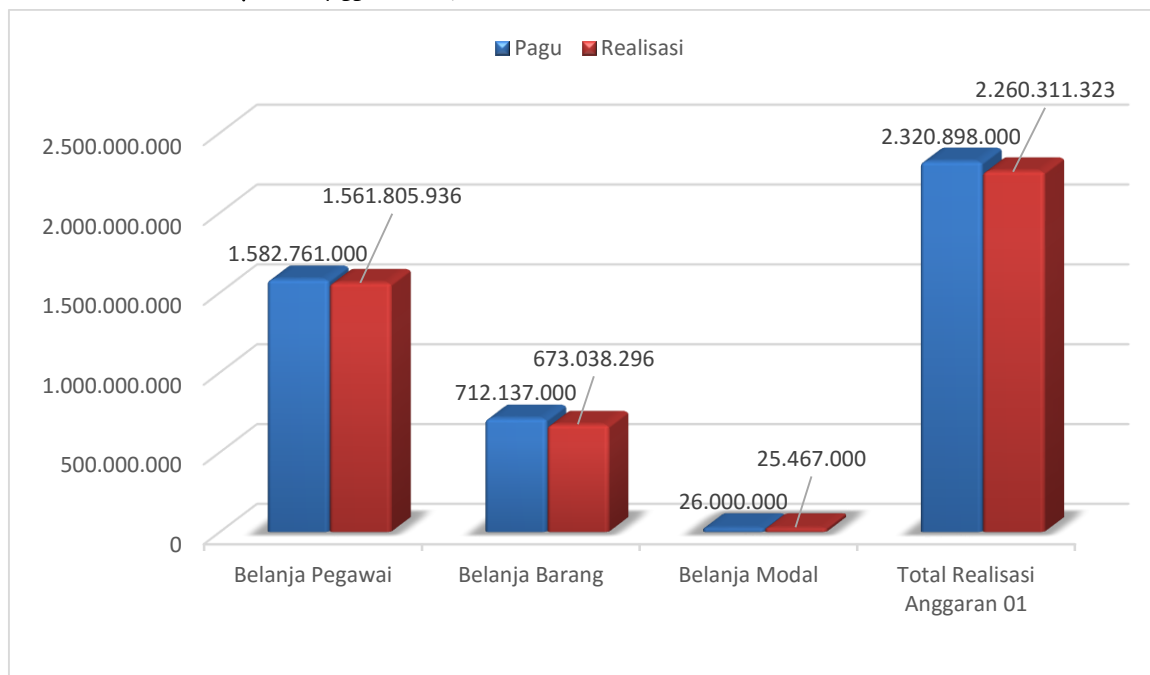
No	Jenis Belanja	DIPA Badan Urusan Administrasi (01)			
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran
			Rp	%	
1	Belanja Modal	26.000.000	25.467.000	97,95 %	533.000

Realisasi Anggaran untuk Unit Organisasi (01) Badan Urusan Administrasi, digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 38. Realisasi Anggaran Unit Organisasi (01) Badan Urusan Administrasi

No	Jenis Belanja	DIPA Badan Urusan Administrasi (01)			
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran
			Rp	%	
1	Belanja Pegawai	1.582.761.000	1.561.805.936	98,68 %	20.955.064
2	Belanja Barang	712.137.000	673.038.296	94,51 %	39.098.704
3	Belanja Modal	26.000.000	25.467.000	97,95 %	533.000
Total Realisasi		2.320.898.000	2.260.311.232	97,39 %	60.586.768

Grafik 4. Persentase Realisasi Anggaran Unit Organisasi (01) Badan Urusan Administrasi Tahun Anggaran 2019



2. Unit Organisasi (04) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

a. Bantuan Pembebasan Biaya Perkara

Pagu pembebasan biaya perkara untuk peningkatan manajemen peradilan pada rencana kerja anggaran kementerian lembaga (RKAKL) yang dituangkan dalam DIPA Pengadilan Agama Maumere tahun 2019 tanggal 05 Desember 2018 sebesar Rp. 9.840.000,- (*Sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah*), dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 39. Realisasi Anggaran Pembebasan Biaya Perkara (dalam rupiah)

No	Jenis Belanja	DIPA Badan Peradilan Agama (04)			
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran
			Rp	%	
1	Belanja Pembebasan Biaya Perkara	9.840.000	9.840.000	100 %	0

b. Biaya Penyelesaian Perkara Di Luar Gedung Pengadilan

Pagu biaya penyelesaian perkara di luar gedung pengadilan untuk peningkatan manajemen peradilan pada rencana kerja anggaran kementerian

lembaga (RKAKL) yang dituangkan dalam DIPA Pengadilan Agama Maumere tahun 2019 tanggal 05 Desember 2018 sebesar Rp. 30.000.000,- (*Tiga puluh juta rupiah*), dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 40. Realisasi Anggaran Penyelesaian Perkara di Luar Gedung Pengadilan (dalam rupiah)

No	Jenis Belanja	DIPA Badan Peradilan Agama (04)			
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran
			Rp	%	
1	Belanja Penyelesaian Perkara Di Luar Gedung Pengadilan	30.000.000	30.000.000	100 %	0

c. Jasa Konsultasi Bantuan Hukum

Pagu jasa konsultasi bantuan hukum untuk peningkatan manajemen peradilan pada rencana kerja anggaran kementerian lembaga (RKAKL) yang dituangkan dalam DIPA Pengadilan Agama Maumere tahun 2019 tanggal 05 Desember 2017 sebesar Rp. 24.000.000,- (*Dua puluh empat juta rupiah*), dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 41. Realisasi Anggaran Jasa Konsultasi Bantuan Hukum (dalam rupiah)

No	Jenis Belanja	DIPA Badan Peradilan Agama (04)			
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran
			Rp	%	
1	Belanja Jasa Konsultasi Bantuan Hukum	24.000.000	24.000.000	100 %	0

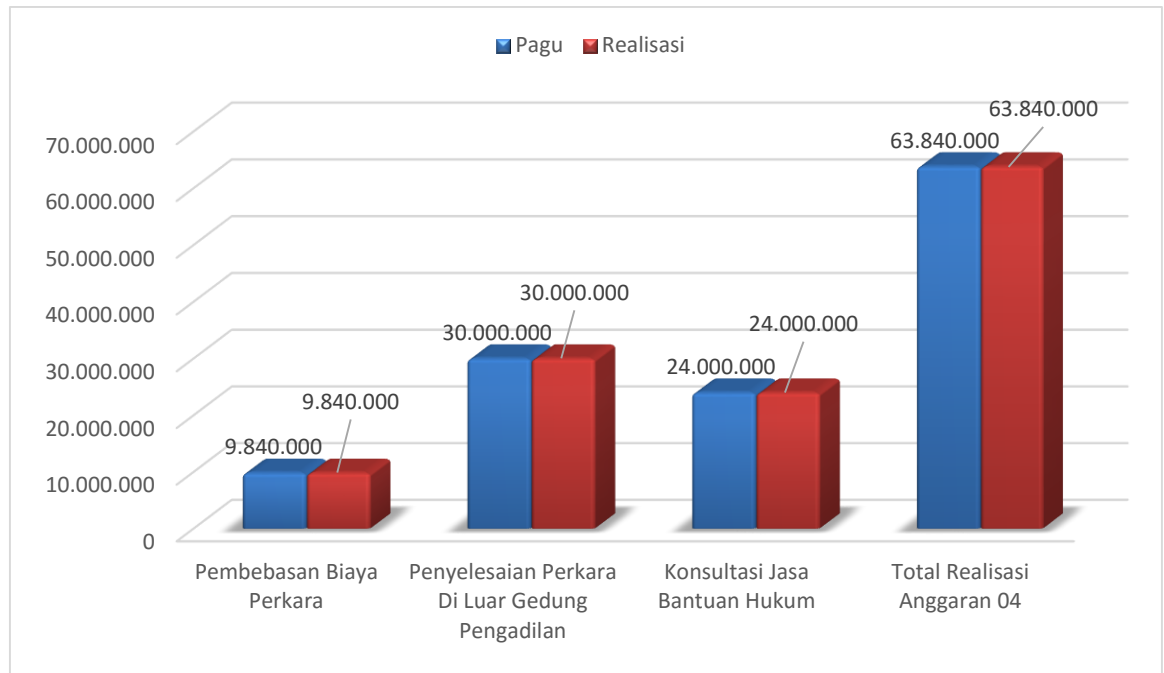
Realisasi Anggaran untuk Unit Organisasi (04) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 42. Realisasi Anggaran Unit Organisasi (04) Badan Peradilan Agama

No	Jenis Belanja	DIPA Badan Peradilan Agama (04)			
		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran
			Rp	%	
1	Belanja Pembebasan Biaya Perkara	9.840.000	9.840.000	100 %	0
2	Belanja Penyelesaian Perkara Di Luar Gedung Pengadilan	30.000.000	30.000.000	100 %	0

3	Belanja Jasa Konsultasi Bantuan Hukum	24.000.000	24.000.000	100 %	0
Total Realisasi		63.840.000	63.840.000	100 %	0

Grafik 5. Persentase Realisasi Anggaran Unit Organisasi (04) Badan Peradilan Agama Tahun Anggaran 2019



B. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana Kantor Pengadilan Agama Maumere sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik kepada para pencari keadilan. Mulai Tahun 2013, Pengadilan Agama Maumere telah menempati gedung Kantor baru yang beralamat di Jalan Diponegoro, Kecamatan Alok Barat, Kelurahan Wolomarang, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Dengan ditempatinya gedung kantor baru ini, diharapkan pelayanan publik yang diberikan kepada para pencari keadilan dapat lebih optimal karena sarana dan prasarana yang ada sudah cukup menunjang. Sehingga tahun demi tahun kantor Pengadilan Agama Maumere terus berusaha untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan prima kepada para pencari keadilan walaupun masih jauh dari sempurna. Sarana dan prasarana yang dimiliki sampai dengan tahun 2019 sebagai berikut :

1. Matriks Sarana dan Prasarana Gedung

Gambar 13. Foto Sarana gedung PA. Maumere



Kantor Pengadilan Agama Maumere memiliki luas tanah keseluruhan 3.840 M², dengan luas bangunan kantor 500 m² x 2 lantai = 1.000 M² yang diresmikan pada 31 Januari 2017 oleh Ketua Mahkamah Agung

Republik Indonesia Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H. Adapun matriks sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel . 43. Sarana dan Prasarana Kantor PA. Maumere

NO	Uraian	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
9.	PA. MAUMERE				
I	Sarana / Prasarana Gedung				
1	Ruang Ketua	1	1	-	-
2	Ruang Wakil Ketua	1	1	-	-
3	Ruang Hakim	1	1	-	-
4	Ruang Panitera	1	1	-	-
5	Ruang Sekretaris	1	1	-	-
6	Ruang Sidang Utama	1	1	-	-
7	Ruang Sidang II	1	1	-	-
8	Ruang Kepaniteraaan	1	1	-	-
9	Ruang Kesekretariatan	1	1	-	-
10	Ruang PP/JSP	1	1	-	-
11	Ruang Kasir	1	1	-	-
12	Ruang Bendahara	1	1	-	-
13	Ruang Posbakum	1	1	-	-
14	Ruang Server	1	1	-	-
15	Ruang Mediasi	1	1	-	-
16	Ruang PTSP	1	1	-	-
17	Ruang Rapat	1	1	-	-
18	Ruang Arsip Perkara	1	1	-	-
19	Ruang Arsip Umum	1	1	-	-
20	Ruang Perpustakaan	1	1	-	-
21	Ruang Tamu	1	1	-	-

22	Ruang Musholla	1	1	-	-
23	Ruang Laktasi dan Bermain Anak	1	1	-	-
24	Ruang Tunggu Sidang	1	1	-	-
25	Ruang Tunggu Mediasi	1	1	-	-
26	Ruang Tunggu PTSP	1	1	-	-
27	Pos Satuan Pengamanan	1	1	-	-
28	Ruang Gudang	1	1	-	-
II	Sarana /Prasarana Fasilitas				
1.	Lemari Besi	30	30	-	-
2.	Lemari Kayu	26	16	-	10
3.	Rak Besi	10	7	-	3
4.	Rak Kayu	13	10	-	3
5.	Filling Cabinet Besi	7	5	-	2
6.	Brankas	2	2	-	-
7.	Lemari Display	1	1	-	-
8.	Tabung Pemadam Api	2	2	-	-
9.	CCTV	1	1	-	-
10.	Papan Visual	19	10	-	9
11.	Alat Penghancur Kertas	1	1	-	-
12.	Mesin Absensi	2	1	-	1
13.	LCD Proyektor	1	1	-	-
14.	Teralis	1	1	-	-
15.	Meja Kerja Kayu	56	41	-	15
16.	Kursi Besi/ Metal	74	63	-	13
17.	Kursi Kayu	34	8	-	26
18.	Sice	7	4	-	3
19.	Bangku Panjang Kayu	5	2	-	3
20.	Meja Rapat	4	2	-	2
21.	Meja Komputer	7	4	-	3
22.	Meja Telepon	1	1	-	-
23.	Meja Resepsionis	1	1	-	-
24.	Kursi Fiberglass/Plastik	10	-	-	10
25.	Jam Elektronik	4	2	-	2
26.	AC Split	15	12	-	3
27.	Kipas Angin	7	3	-	4
28.	Kitchen Set	1	1	-	-
29.	Tandon Air	1	1	-	-
30.	Televisi	6	3	-	3
31.	Sound System	1	-	-	1
32.	Stabilisator	6	4	-	2
33.	Lambang Garuda Pancasila	3	3	-	-
34.	Tiang Bendera	5	2	-	3

35.	Kaca Hias	17	15	-	2
36.	Dispenser	5	4	-	1
37.	Mimbar/ Podium	4	4	-	-
38.	Palu Sidang	1	1	-	-
39.	Lambang Instansi	3	2	-	1
40.	HandyCam	1	1	-	-
41.	Karpet	1	1	-	-
42.	Gordyn/Kray	16	16	-	-
43.	UPS	5	4	-	1
44.	Camera Digital	1	1	-	-
45.	LCD Monitor	1	1	-	-
46.	PABX	1	1	-	-
47.	Pesawat Telepon	17	16	-	1
48.	Faksimile	1	-	-	1
49.	Scanner	2	2	-	-
50.	Genset	2	1	-	1
51.	PC Unit	23	18	-	5
52.	Laptop	17	13	-	4
53.	Printer	26	10	-	16
54.	Server	2	1	-	1
55.	Router	1	1	-	-
56.	Portable Hardisk	2	-	-	2
57.	Rak Server	1	1	-	-

Selain sarana dan prasarana yang ada saat ini di Pengadilan Agama Maumere yang terdaftar dalam Barang Milik Negara (BMN), di tahun 2019 Pengadilan Agama Maumere juga menerima alat pengolah data pendung E-Court dari BUA Mahkamah Agung RI dengan mekanisme transfer masuk BMN, serta mesin Fotocopy dengan status pinjam pakai dari Pengadilan Tinggi Agama NTT. untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel . 44. Sarana dan prasarana Kantor PA. Maumere

No	Uraian Jenis Barang/Alat	Tanggal/ Tahun Perolehan	Kondisi			Status Perolehan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	UPS PC	26-11-2019	√			Tranfer BMN BUA ke Satker
2	Courner E-Court	26-11-2019	√			Tranfer BMN BUA ke Satker

3	Pc. All In	26-11-2019	√			Tranfer BMN BUA ke Satker
4	Rak Server	26-11-2019	√			Tranfer BMN BUA ke Satker
5	Server	26-11-2019	√			Tranfer BMN BUA ke Satker
6	Mesin Fotocopy	07-11-2019	√			Pinjam Pakai

2. Matriks Barang Milik Negara

a. Kendaraan Dinas

Sebagai sarana penunjang kerja serta untuk memperlancar operasional aparaturnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pengadilan Agama Maumere memiliki 7 buah kendaraan dinas yang dapat dilihat pada matriks berikut :

Tabel . 45. Matriks BMN PA. Maumere Tahun 2019

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Jenis Kendaraan Roda 4					
1	Toyota Innova	2007	√			
2	Suzuki APV Arena	2011	√			
II	Jenis Kendaraan Roda 2					
1	Suzuki Satria RU 120	2000			√	
2	Supra Fit NF 100 SL	2006	√			
3	Karisma X 125 D NF 125 D	2006	√			
4	Supra X 125 D NF 125 D	2005	√			
5	Suzuki Thunder	2007	√			

b. Rumah Dinas dan Mess Pegawai

Pengadilan Agama Maumere memiliki sebuah rumah dinas yang diperuntukan bagi Ketua PA, jenis bangunan Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen tahun perolehan 2010 yang beralamat di Jl. Waiklau No. 60, Madawat, Maumere. Sedangkan yang menjadi Mess Pegawai merupakan Gedung Kantor Lama Pengadilan Agama Maumere yang beralamat di Jl. Waiklau No. 56, Madawat Maumere. Alih fungsi gedung kantor lama ini didasarkan pada SK. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 740/SEK/XI/2019 tanggal 19 November 2019 tentang Alih Fungsi Pemanfaatan Tanah Dan/Atau Gedung Kantor Pengadilan Agama Maumere Yang Lama Menjadi Tanah Dan/Atau Bangunan Mess. Lengkapnya dapat dilihat pada matriks berikut :

Tabel . 46. Rumah dinas dan Mess pegawai PA. Maumere

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Rumah Dinas					
1	Rumah Dinas Ketua	1	✓			
II	Mess Pegawai					
1	Mess Pegawai	1	✓			

3. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana
a. Pengadaan Sarana Pengadilan Agama Maumere

Untuk menunjang kinerja aparaturnya peradilan dan kelancaran dalam pelayanan kepada para pihak pencari keadilan pada tahun 2019, Pengadilan Agama Maumere mendapatkan alokasi belanja modal untuk Pengadaan Alat Pengolah Data Penunjang SIPP berupa dua (2) buah Laptop untuk Hakim dengan alokasi dana sebesar Rp. 26.000.000.

b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Pemeliharaan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Maumere yang disediakan dalam DIPA tahun Anggaran 2019 meliputi pemeliharaan gedung dan bangunan, pemeliharaan peralatan serta mesin dengan rincian dan realisasi sebagai berikut:

Tabel . 47. Pemeliharaan Sarana dan prasarana Kantor PA. Maumere

No	Jenis Belanja Barang	Pagu Anggaran	Rincian Pemeliharaan	Realisasi Anggaran
1	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp. 73.980.000	Perawatan Gedung dan Halaman Kantor	Rp. 73.979.500
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp. 395.000 Rp. 7.000.000 Rp. 5.600.000 Rp. 9.745.000 Rp. 9.660.000 Rp. 7.200.000 Rp. 48.400.000	- Genset - PC - Laptop - Roda 2 - Printer - AC - Roda 4	Rp. 395.000 Rp. 7.000.000 Rp. 5.600.000 Rp. 9.745.000 Rp. 9.660.000 Rp. 7.200.000 Rp. 48.398.750

c. Alih Fungsi dan Penghapusan BMN

Pada Tahun 2018 Pengadilan Agama Maumere telah menerima SK. alih fungsi tanah dan/atau gedung Kantor Lama sesuai SK. Sekretaris Mahkamah Agung RI. Nomor 740/SEK/XI/2018 tanggal 19 November 2018 tentang Alih Fungsi Pemanfaatan Tanah Dan/ Atau Gedung Kantor Pengadilan Agama Maumere Yang Lama Menjadi Tanah Dan/ Atau Bangunan Mess. Sedangkan untuk Penghapusan Barang Milik Negara untuk Tahun 2019 Pengadilan Agama Maumere belum melaksanakan.

4. Administrasi Tata Persuratan

Selama tahun 2019 Pengadilan Agama Maumere telah mengelola surat masuk sebanyak 385 surat sedangkan surat keluar sebanyak 920 surat.

Rekapitulasi surat masuk dan surat keluar sesuai dengan kode klasifikasi selama tahun 2019 sebagai berikut :

a. Surat Masuk

Tabel . 48. Surat Masuk PA. Maumere Tahun 2019

Bulan	KP	KU	PL	PP	PB	PS	OT	KS	HM	HK	Jumlah
Januari	7	9	1	9	1	-	1	-	10	4	38
Pebruari	3	-	2	-	1	1	3	-	7	2	19
Maret	13	3	1	-	1	-	1	-	6	3	28
April	5	11	1	1	-	-	2	-	7	4	31
Mei	13	11	-	1	-	-	4	2	8	8	47
Juni	5	6	1	-	-	-	2	-	7	6	27
Juli	15	7	3	-	-	-	4	-	12	10	51
Agustus	3	8	-	-	-	-	3	-	16	6	36
September	7	9	-	-	1	-	-	-	5	5	27
Oktober	16	4	4	1	1	-	-	-	7	2	35
Nopember	4	6	1	2	-	-	1	-	9	3	26
Desember	5	4	-	-	-	-	4	-	5	2	20
Jumlah											385

b. Surat Keluar

Tabel . 49. Surat Keluar PA. Maumere Tahun 2019

Bulan	KP	KU	PL	PP	PB	PS	OT	KS	HM	HK	Jumlah
Januari	150	12	46	-	1	-	11	-	10	9	238
Pebruari	24	4	5	2	1	-	4	1	1	8	50
Maret	30	9	4	-	-	-	6	-	4	5	58
April	42	7	-	1	1	-	18	-	5	4	78
Mei	73	19	5	2	-	-	3	-	4	8	114
Juni	16	20	2	-	-	-	9	-	4	12	63
Juli	41	21	2	-	-	-	5	-	6	14	89
Agustus	29	8	1	1	-	-	8	-	1	6	54
September	19	8	2	-	-	-	2	-	1	3	35
Oktober	45	10	2	-	1	-	5	-	1	6	70
Nopember	23	7	-	-	-	-	2	-	3	3	38
Desember	23	4	2	-	-	-	2	-	-	2	33
Jumlah											920

C. Dukungan Teknologi Informasi Terkait SIPP**- Implementasi *E-Court* di Lingkungan Peradilan Agama**

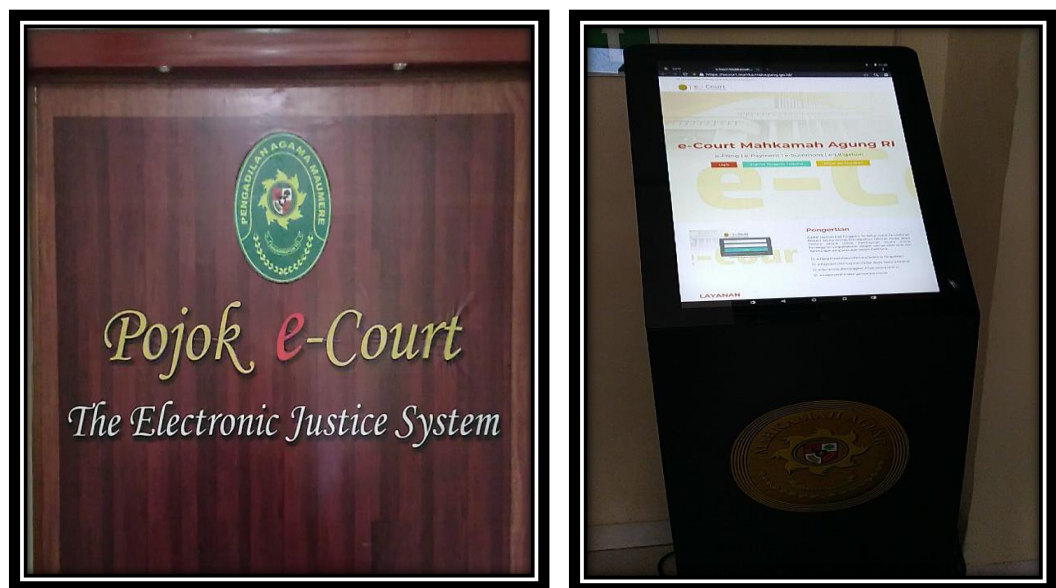
E-Court atau yang lebih akrab dengan istilah peradilan secara elektronik merupakan terobosan yang diluncurkan oleh Mahkamah Agung dibidang administrasi pelayanan peradilan berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi (TI) dengan berlandaskan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan pelayanan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan serta untuk mengikuti tuntutan dan perkembangan zaman serta pelayanan administrasi peradilan yang cepat dan efisien.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 sendiri mengatur mengenai pengguna, pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya perkara, pemanggilan para pihak yang semuanya dilakukan secara elektronik. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, pengguna yang dapat beracara menggunakan *e-Court* hanya pengguna terdaftar. Pengguna terdaftar yaitu advokat yang telah diverifikasi di Pengadilan Tinggi. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 pun belum mengatur mengenai persidangan secara elektronik. Maka dari itu, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 9 Agustus 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Dampak dari keluarnya peraturan terbaru tersebut, Mahkamah Agung melakukan terobosan baru dalam aplikasi *e-Court* dengan menambahkan menu *e-litigation* (persidangan secara elektronik). Dengan penambahan fitur yang telah mencakup *e-filing* (Pendaftaran perkara), *e-payment* (pembayaran), dan *e-summons* (Pemanggilan). Dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, pengguna *e-Court* akan menjadi 2 (dua) kategori yaitu Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain. Untuk Pengguna Lain, akun didapatkan melalui meja *e-Court* atau Pojok *E-Court* pada setiap pengadilan.

Pengadilan Agama Maumere sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang dituntut untuk segera melaksanakan amanah dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Sebagai wujud nyata Pengadilan Agama Maumere telah melakukan suatu upaya Sosialisasi *E-Court* kepada para Pengacara/Advokat di Wilayah Kabupaten Sikka yang merupakan wilayah Yurisdiksi dari Pengadilan Agama Maumere, dan juga kepada Pejabat kepaniteraan serta Petugas PTSP Kepaniteraan. Selain pelaksanaan sosialisasi, Pengadilan Agama Maumere juga telah menyediakan sarana dan prasarana pendukung antara lain Pojok *E-Court* dan Penunjukan Petugas *E-Court* yang terintegrasi dengan pelayanan PTSP Pengadilan Agama Maumere sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Ketua pengadilan Agama Maumere Nomor : W23-A9/ 735 /KP.00.3/SK/08/2019 tanggal 20 Agustus 2019, hal ini guna mendukung implementasi pelayanan perkara secara *E-Court* yang maksimal demi mewujudkan dan meningkatkan kepuasan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.

Dalam kurun waktu tahun 2019 Pengadilan Agama Maumere telah menerima sebanyak 2 (dua) perkara melalui *E-Court* dan penerimaan perkara ini juga telah di laporkan kepada Badan Peradilan Agama secara berjenjang melalui Pengadilan Tinggi Agama NTT.

Gambar 14. Sarana dan prasarana pendukung E-Court PA. Maumere



- **Implementasi Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Peradilan Agama**

Untuk menjamin pelaksanaan Administrasi Pengadilan yang tertib, modern dan akuntabel. Mahkamah Agung menerapkan bahwa seluruh pengadilan harus beralih dari administrasi Pengadilan yang bersifat manual (konvensional) beralih ke administrasi pengadilan yang berbasis Teknologi Informasi. Pada era Globalisasi saat ini suatu Lembaga tanpa didukung Teknologi Informasi yang memadai tentu tidak akan berjalan dengan maksimal apalagi untuk Lembaga Peradilan dimana untuk memberikan pelayanan Informasi yang prima, transparan dan akuntabel kepada masyarakat pencari keadilan maka sarana dan prasarana tersebut sangat dibutuhkan. Begitu juga Sumber Daya Manusia yang ada harus terampil dalam mengoperasikannya. Salah satu aplikasi penunjang yang terintegrasi oleh Mahkamah Agung RI dalam pelaksanaan Teknologi Informasi adalah penerapan aplikasi Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dengan Versi 3.3.0 yang pelaksanaan update terakhir di tahun 2019, hal ini menjadi media pendukung yang digunakan pada Pengadilan Agama Maumere dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Pada tahun 2019 juga Pengadilan Agama Maumere menerima alokasi anggaran pengadaan alat pengolah data (Laptop) sebagai pendukung SIPP untuk Hakim sebanyak 2 (dua) unit dan hibah Pc. Sebanyak 4 (empat) unit yang telah di realisasikan sebagai pendukung optimalisasi Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang digunakan dalam Pelayanan PTSP di Pengadilan Agama Maumere.

Sistem pelayanan yang dilakukan pada aplikasi Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) antara lain sebagai berikut :

1. Pendaftaran perkara;
2. Register Perkara Gugatan dan Permohonan
3. Jurnal Keuangan Perkara Gugatan dan Permohonan
4. Pembuatan PMH;

5. Pembuatan Penunjukan PP
6. Pembuatan Penunjukan Jurusita /JSP
7. Pembuatan PHS;
8. Jadwal Sidang;
9. Relas Panggilan/Tabayun;
10. Berita Acara Sidang;
11. Penundaan Sidang;
12. Mediasi;
13. Putusan/Penetapan;
14. Pemberitahuan Putusan;
15. Minutasi. Dll.

Gambar . 15. Screenshot Aplikasi SIPP PA. Maumere Tahun 2019

Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN AGAMA MAUMERE

330-1

Login

- SIPP MAHKAMAH AGUNG RI -
- DIREKTORI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI -
- SIMTALAK -
- PENDUKUNG KINERJA SIPP -
- BLANGKO TAMBAHAN SIPP (ABT) -
- APLIKASI PEDIS -
- ANTRIAN SIDANG -
- DESPA -
- REGISTER DAN KEUANGAN PERKARA -

RASIO PENANGANAN PERKARA SIPP LOKAL
91.04 %

Sisa Tahun Lalu : 12 | Masuk Tahun Ini : 55
Putus Tahun Ini : 61 | Belum Minutasi : 0 | Minutasi Tahun Ini : 61

Username: Kasir
Password: *****
Login

Load Time : 0.0206 Sec. | Memory Available: 1G | Memory Usage : 3.9MB
Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015
Version 3.3.0-1

Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN AGAMA MAUMERE

330-1

Selamat Datang: Tami Pramana Putra, S.H.
Anda Login Sebagai: [Kasir]
[Lihat Profil] [Keluar]

Home | Jurnal Perkara | Register Induk Keuangan | Perdata | Jinayat | Laporan | Jadwal Sidang | Anis Perkara | Antrian | e-Court | e-Payment | Pesan | Help

STATISTIK PERKARA DAN REMINDER

Key Indikator Perkara: Penambahan Perkara | Status Perkara | Status Jurnal Keuangan Perdata

Desember 2019

No	Perkara	Sisa Bulan Lalu	Masuk	Putus	Rasio Penanganan Perkara	Sisa	Banding	Kasasi	Peningkatan Kembali
1	Perdata Gugatan	6	-	1	100.00 %	5	-	-	-
2	Perdata Permohonan	1	-	-	0.00 %	1	-	-	-
3	Gugatan Sederhana	-	-	-	0.00 %	-	-	-	-
4	Jinayat	-	-	-	0.00 %	-	-	-	-
5	Praperadilan Jinayat	-	-	-	0.00 %	-	-	-	-

Load Time : 0.0132 Sec. | Memory Available: 1G | Memory Usage : 4.14MB
Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015
User Online : Version 3.3.0-1

Adapun perangkat keras (*hardware*) yang dimiliki Pengadilan Agama Maumere sebagai pendukung optimalisasi aplikasi Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) saat ini adalah :

1. Pc. 8 unit;
2. Laptop 5 unit;
3. TV Monitor 2 unit;
4. Printer 5 unit;
5. Server 2 unit; dan
6. Perangkat jaringan 4 unit.

Berdasarkan hasil rapor penilaian penyelesaian perkara yang di rilis oleh Badan Pengadilan Agama Mahkamah Agung RI pertanggal 14 Desember 2019 Pengadilan Agama Maumere mendapatkan nilai capaian penyelesaian perkara sebesar 92,14%. Semoga dengan capaian ini tidak menurunkan semangat bagi seluruh aparaturnya terkait dalam mengoptimalkan Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), bahkan semoga menjadi spirit untuk dapat lebih meningkatkan kinerja sehingga mampu memberikan capaian penyelesaian perkara yang lebih baik lagi.

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

- Akreditasi Penjaminan Mutu (APM)

Gambar . 16. Sertifikat APM PA. Maumere



Salah satu bentuk inovasi Badan peradilan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pelaksanaan program Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) yang dulunya adalah program Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM).

Di pertengahan tahun 2019 Pengadilan Agama Maumere mengalami adanya masa transisi, karena adanya promosi dan mutasi Ketua, Wakil Ketua dan Hakim Peradilan Agama bulan Maret dan April Tahun 2019 maka berimplikasi pada

susunan struktur Tim Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) pada Pengadilan Agama Maumere, karena baik unsur Pimpinan maupun Hakim terjadi perubahan, sehingga perlu menetapkan kembali struktur baru Tim Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Maumere Nomor W23-A9/471/OT.01.3/SK/05/2019 tanggal 16 Mei 2019 dengan Susunan Sebagai berikut :

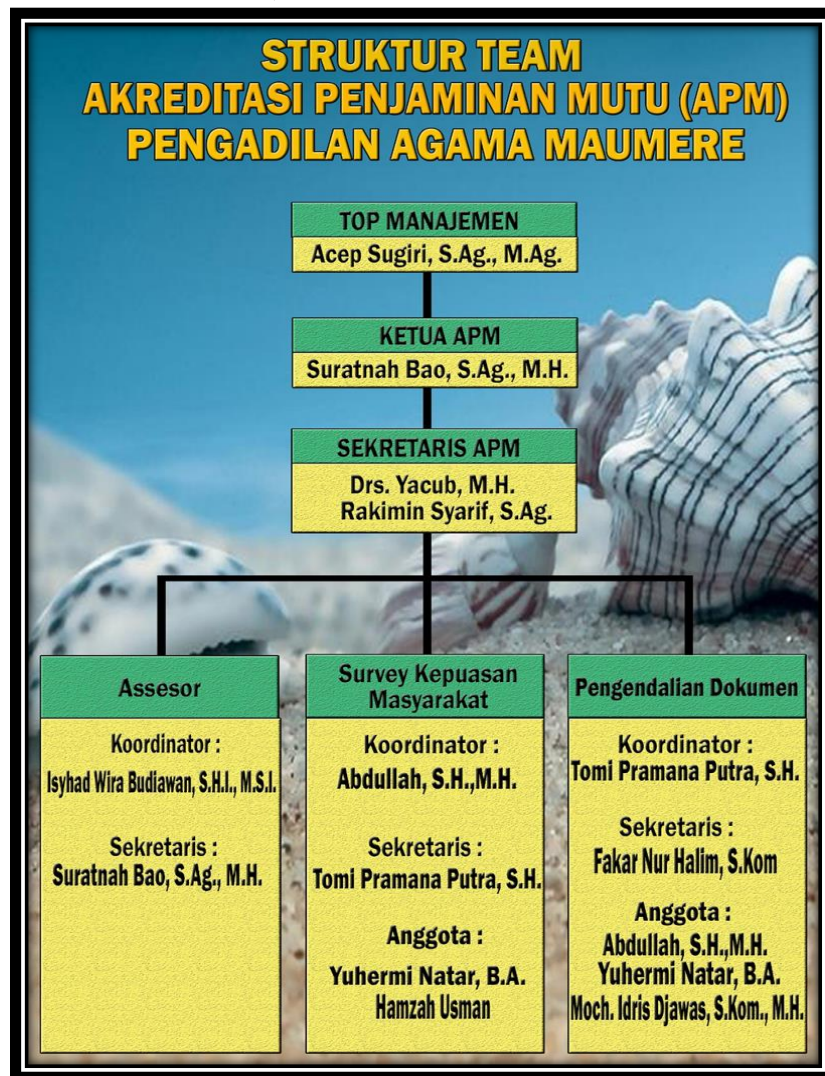
Tabel. 50. Susunan Tim APM Pengadilan Agama Maumere Tahun 2019

NO	NAMA / NIP	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1	2	4	5
1	Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. 19730804 200112 1 003	Ketua	Top Manajemen
2	Suratnah Bao, S.Ag, M.H.	Wakil Ketua	Ketua APM

	19740301.200604.2.001		
3	Drs. Yacub, M.H. 19660718.199903.1.001	Panitera	Sekretaris Akreditasi
4	Rakimin Syarif, S.Ag. 19670531.199603.1.001	Sekretaris	Sekretaris Akreditasi
5	Isyhad Wira Budiawan, S.H.I., M.S.I. 19801110 201101 1 004	Hakim Pratama Madya	Koordinator Asessor Internal
6	Suratnah Bao, S.Ag, M.H. 19740301.200604.2.001	Wakil Ketua	Sekretaris
7	Tomi Pramana Putra, S.H. 19860623.201212.1.003	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Koordinator Pengendali Dokumen APM
8	Fakar Nur Halim, S.Kom. 19880918.201503.1.002	Kasubbag Umum dan Keuangan	Sekretaris
9	Yuhermi Natar, B.A. 19600708.199203.2.001	Panmud Gugatan	Anggota
10	Abdullah, S.H, M.H 19700608.200312.1.002	Panmud Hukum	Anggota
11	Moch. Idris Djawas, S.Kom. M.H. 19811217.201101.1.003	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	Anggota
12	Yuhermi Natar, BA. 19600708.199203.2.001	Panmud Gugatan	Koordinator Survey Kepuasan Masyarakat
13	Abdullah, S.H, M.H 19700608.200312.1.002	Panmud Hukum	Sekretaris
14	Tomi Pramana Putra, S.H. 19860623.201212.1.003	Kasir	Anggota

15	Hamzah Usman 19741102.201408.1.002	Jurusita	Anggota
----	---------------------------------------	----------	---------

Gambar 17. Foto Struktur Tim APM PA. Maumere Tahun 2019



Tantangan baru dari sebuah restorasi implemementasi Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) tidak mengikat hanya pada kelengkapan dokumen serta sarana dan prasarana semata, tetapi hal yang menjadi mendasar adalah implementasi pelaksanaan tupoksi sesuai regulasi dan Standar Operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, khususnya pada wilayah Pelayanan masyarakat pencari keadilan dan pelaksanaan *Job Description* masing-masing aparaturnya Pengadilan Agama Maumere.

Pengadilan Agama Maumere Juga telah melaksanakan *Asesmen Surveillance* Pertama Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) yang dilaksanakan pada tanggal 26 s.d. 28 Juni 2019, Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 2065/DJA/OT.01.3/5/2019 Tanggal 27 Mei 2019 Cq. Surat Tugas Ketua Pengadilan Agama Nusa Tenggara Timur Tanggal 12 Juni 2019 perihal Pelaksanaan *Asesmen Surveillance* Pertama APM dengan menunjuk Tim *Asesmen Surveillance* eksternal Pengadilan Agama Maumere sebagai berikut :

Tabel. 51. Bagan nama Tim Asessor Eksternal Pengadilan Agama Maumere

No	Nama Asessor Eksternal	Pendamping
1	Bahrudin, A.Md., S.H., M.H. (Sekretaris PTA. NTT)	- Juhni, S.H., M.H. (Panmud Banding PTA. NTT)

Dan setelah melewati beberapa tahapan baik pada saat *opening meeting*, pemeriksaan eviden maupun interview secara langsung pada masing-masing tupoksi stekholder mengenai implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) di Pengadilan Agama Maumere maupun sampai tahap *closing meeting* dengan berjalan aman dan lancar, diakhir pelaksanaan *Asesmen Surveillance* sekaligus dirangkaikan penyerahan Kontrak Kerja dari Ketua Tim *Asesmen Surveillance* kepada Ketua Pengadilan Agama Maumere.

Gambar. 18. Foto Pelaksanaan Kegiatan "Opening Meeting Asesmen Surveillance Pertama APM Pengadilan Agama Maumere Tahun 2019"





*Gambar .19. Foto Pelaksanaan
"Interview Tim Asesmen
kepada Wakil Ketua selaku
Ketua APM mengenai
Implementasi APM"*

*Gambar. 20. Foto Pelaksanaan
"Interview Ketua Tim Asesmen
kepada Panitera dan Sekretaris
selaku Sekretaris APM mengenai
Implementasi APM"*



*Gambar 21. Foto Pelaksanaan
Kegiatan "Closing Meeting
Asesmen Surveillance Pertama
APM Pengadilan Agama Maumere
Tahun 2019*



Gambar 22. Foto Pelaksanaan Penyerahan Kontrak Kerja dari Ketua Tim Asesmen Surveillance kepada Ketua PA. Maumere



Gambar 23. Foto Bersama Tim Asesmen Surveillance bersama Keluarga besar PA. Maumere

Seluruh aparaturnya Pengadilan Agama Maumere sangat berharap semoga hasil *Asesmen Surveillance* dapat dicapai dengan sangat memuaskan, sehingga di penghujung akhir bulan Oktober tibalah saat yang sangat dinanti dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillahirabbil alamin berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 5367/DJA/OT.01.3/X/2019 Tanggal 30 Oktober 2019 perihal Hasil Penilaian Akreditasi penjaminan Mutu Tahun 2019 menjawab sebuah usaha dan perjuangan bagi seluruh aparaturnya Pengadilan Agama Maumere, karena Pengadilan Agama Maumere kembali mengukir prestasi dengan kembali mendapatkan nilai predikat **“A” Excellent**, hal ini menjadi bukti komitmen dan kerja keras seluruh aparaturnya Pengadilan Agama Maumere, semoga capaian ini dapat dipertahankan dan menjadi spirit energi dalam meningkatkan kinerja aparaturnya serta dalam meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.

Gambar 24. Foto Lampiran SK. Dirjen Badilag MARI tentang Hasil APM Tahun 2018 dan 2019

<p>Lampiran Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 5367 /DJA/OT.01.3/X/2019 Tanggal : 30 Oktober 2019</p> <p>HASIL AKREDITASI PENJAMINAN MUTU BADAN PERADILAN AGAMA SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA TAHUN 2018 DAN TAHUN 2019</p>				
26	PTA Kupang			
1.	PTA Kupang	-	A (Excellent)	SAPM II 2018
2.	PA Labuan Bajo	II	A (Excellent)	SAPM II 2018
3.	PA Lewoleba	II	A (Excellent)	SAPM II 2018
4.	PA Ruteng	II	A (Excellent)	SAPM II 2018
5.	PA Waingapu	II	B	APM III 2018
6.	PA Waikabubak	II	B	APM III 2018
7.	PA Kefamenanu	II	B	APM III 2018
8.	PA Larantuka	II	B	APM III 2018
9.	PA Bajawa	II	A (Excellent)	APM III 2018
10.	PA Atambua	II	B	APM III 2018
11.	PA So'e	II	A (Excellent)	Surveillance I 2018
12.	PA Kupang	IB	A (Excellent)	Surveillance I 2018
13.	PA Maumere	II	A (Excellent)	Surveillance I 2019
14.	PA Kalabahi	II	A (Excellent)	Surveillance I 2019
15.	PA Ende	II	A (Excellent)	Surveillance I 2019

Dalam mendukung pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) yang lebih optimal di Pengadilan Agama Maumere, aparaturnya Pengadilan Agama Maumere mewujudkan komitmen pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersih dan Melayani (WBBM), sebagaimana telah dilakukan Pencanangan Zona Integritas dan Penandatanganan Komitmen Bersama yang dilaksanakan pada tanggal 13 November 2018. Demi memenuhi konsistensi pelaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersih dan Melayani (WBBM), Pengadilan Agama Maumere telah berusaha dengan segala kemampuan memenuhi baik sarana dan prasarana sebagai pendukung terlaksananya implementasi Pembangunan Zona Integritas dari 6 (enam) area yang terdiri :

1. Manajemen Perubahan (Pola pikir)

Diwujudkan dengan Peningkatan pembinaan dan evaluasi secara berjenjang bagi seluruh aparatur Pengadilan Agama Maumere baik yang dilakukan saat pelaksanaan upacara/apel juga saat rapat berkara serta memaksimalkan fungsi dan peranan Role Model dan Agen Perubahan;

2. Penataan Tata Laksana;

Penataan Tata Laksana diwujudkan dengan optimalisasi pelaksanaan kinerja aparatur sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan *Job Description* yang telah ditetapkan serta berusaha menempatkan sumber daya aparatur sesuai dengan disiplin ilmu yang miliki sehingga menciptakan korelasi dalam mewujudkan capaian kinerja yang sesuai dengan rencana strategis dan Visi Misi Pengadilan Agama Maumere.

3. Peningkatan Kualitas SDM;

Peningkatan Kualitas SDM diwujudkan dengan mengikutsertakan aparatur dalam Diklat Penjenjangan seperti PIM IV yang telah diikuti oleh Sekretaris Pengadilan Agama Maumere dan Diklat Bendahara yang telah diikuti oleh Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Maumere, serta meningkatkan kegiatan DDTK bidang kepaniteraan seperti SIPP, E-Court, 9 (sembilan) inovasi unggulan Dirjen Badilag serta E-Litigasi Mahkamah Agung, dan Bidang Kesekretariatan yaitu DDTK aplikasi Surat dan Aplikasi Notifikasi Kenaikan Gaji Berkala dan Kenaikan Pangkat. Peningkatan kualitas SDM ini diharapkan mampu membawa perubahan dalam peningkatan kualitas pelayanan baik secara internal maupun bagi masyarakat pencari keadilan.

4. Akuntabilitas Kinerja;

Akuntabilitas Kinerja merupakan bagian yang menjadi tolak ukur dalam terwujudnya Pengadilan Agama Maumere yang transparan dan akuntabel, baik dalam pelayanan Informasi, Pengaduan juga terhadap akses media elektronik lainnya serta pelaksanaan laporan akuntabilitas kinerja, akuntabilitas kinerja Pengadilan Agama Maumere diwujudkan dengan tersedianya media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat seperti Website yang selalu di update baik

konten maupun berita, Banner-banner, brosur, majalah peradilan yang tersedia di ruang tunggu PTSP dan Ruang tunggu Sidang serta formulir permintaan informasi yang telah disediakan di meja PTSP pelayanan informasi, hal ini sebagai implelementasi dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.

5. Pengawasan; dan

Pengawasan diwujudkan dengan pelaksanaan Pengawasan Hakim Pengawasan Bidang (HAWASBID) secara berkala sesuai jadwal pelaksanaan yang ditetapkan, dan juga hasil pengawasan telah disampaikan kepada seluruh pejabat terkait dan telah tindaklanjuti semua dari hasil temuan pengawasan dan pembinaan sebagaimana dituangkan dalam laporan hasil tindaklanjuti Hakim pengawas Bidang (HAWASBID), hal ini menunjukkan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan serta evaluasi kinerja berjalan dengan baik.

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Pengadilan Agama Maumere adalah hal yang paling penting yang menjadi skala prioritas, dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat Pengadilan Agama Maumere mewujudkan dengan meningkatkan fungsi dan peranan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), penerimaan perkara secara elektronik (E-Court), 9 (sembilan) Inovasi Dirjen Badilag, E-Litigasi, Pelayanan dan prodeo yang optimal dan sidang keliling bagi masyarakat kurang mampu serta Pos Layanan Hukum, dengan menerapkan prinsip pelayanan dengan 3 S (Senyum, Salam dan Sapa) dan 5 R (*Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin*), program ini sangat memberikan kontribusi yang besar kepada masyarakat karena telah memberikan akses kemudahan berperkara di pengadilan Agama Maumere dengan asas Sederhana, cepat dan biaya ringan;

Dari implementasi pelaksanaan Zona Integritas Pengadilan Agama Maumere berdasarkan hasil Assesmen Surveillance dari Asessor Eksternal yang dilaksanakan pada Tanggal 25 s.d. 28 Juni 2019 dan sesuai dengan Lembar kerja Evaluasi (LKE), maka Pengadilan Agama Maumere mendapatkan nilai 87,95. Nilai yang baik ini

akan menjadi spirit dan motivasi bagi seluruh aparaturnya Pengadilan Agama Maumere. Tim Asessor Internal juga secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi sehingga meminimalisir hal-hal menjadi kendala yang dapat menghambat pelaksanaan zona integritas serta memberikan solusi dalam setiap permasalahan yang dihadapi, hal ini menjadi bukti komitmen yang sungguh-sungguh oleh seluruh aparaturnya tentang pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di pengadilan Agama Maumere diharapkan semoga selalu berjalan dengan baik dan terukur, sehingga menjadikan Pengadilan Agama Maumere menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersih dan Melayani (WBBM).

Gambar 25. Foto Penganjangan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM



Gambar 26. Foto Piagam Penganjangan dan Komitmen Bersama Zona Integritas



- **Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)**

Sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tanggal 2 Agustus 2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Peradilan Agama, maka Ketua Pengadilan Agama Maumere tidak menunggu lama dan langsung mengambil langkah kongkrit dengan mengintruksikan Kepada Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Maumere untuk segera menindaklanjuti permintaan surat Dirjen Badan Peradilan Agama baik perencanaan maupun penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan Standar yang ditetapkan oleh Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, sehingga pada bulan Januari 2019 sarana dan Prasarana pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada pengadilan Agama Maumere telah selesai dibuat dan dapat digunakan untuk pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan, walaupun dalam kenyataan masih belum secara optimal karena ada dua komponen pendukung yaitu Petugas Bank BNI Cabang Maumere dan petugas PT. POS Cabang Maumere belum dapat tersedia dalam pelayanan PTSP di Pengadilan Agama Maumere, sehingga masyarakat masih melakukan pembayaran dan Cap Pos secara manual di kantor Masing-masing. Belum tersediannya petugas Bank BNI dan petugas PT. POS dikarenakan masih menunggu kontrak Kerja yang sementara masih tahap kajian oleh masing-masing Pimpinan baik pihak Bank BNI Cabang Maumere maupun pihak PT. POS Cabang Maumere.

Namun dengan keterbatasan dan kekurangan komponen pendukung tidak mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan oleh Petuags PTSP Pengadilan Agama Maumere kepada masyarakat pencari keadilan. Karena Pengadilan Agama Maumere selalu berupaya secara optimal mewujudkan pelayanan dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan dengan menerapkan 3 S (Senyum, Salam dan Sapa) dan 5 R (*Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin*).

Gambar 27. Foto Sarana dan Petugas PTSP PA. Maumere



- **Inovasi Pelayanan Publik**

Sejak 9 (sembilan) aplikasi inovasi Badan Peradilan Agama di uji coba berdasarkan sebagaimana tertuang dalam surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 3396/DJA/OT.02.1/VII/2019 tanggal 15 Juli 2019, maka sejak saat itu seluruh Pengadilan Agama wajib melaksanakan 9 (sembilan) aplikasi inovasi Badilag tersebut yang terdiri dari:

a. Aplikasi Antrian sidang;

Fungsi aplikasi ini adalah menyediakan pendaftaran antrian secara online dan memberikan informasi waktu pelaksanaan sidang yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhannya;

b. Aplikasi Informasi Perkara dan Produk Pengadilan ;

Fungsi aplikasi ini adalah memberikan informasi terkait proses perkara kepada para pihak, yang meliputi nomor perkara, nama para pihak, susunan majelis hakim, tahapan persidangan, jadwal persidangan dan biaya perkara berdasarkan permintaan dari para pihak;

c. Aplikasi Notifikasi perkara

Fungsi aplikasi ini adalah memberikan notifikasi terkait status perkara kepada para pihak yang meliputi jadwal sidang, status perkara dan keuangan perkara;

d. Aplikasi *E-Kuangan*;

Fungsi aplikasi ini adalah sebagai salah satu sarana validasi data keuangan perkara, pencetakan buku-buku keuangan dan saran pelaporan keuangan perkara.

e. Aplikasi *E-Register*;

Fungsi aplikasi ini adalah sebagai salah satu sarana validasi data SIPP satuan kerja dan sebagai saran pencetakan buku-buku register sesuai pola bindalmin;

f. Command Center.

Fungsi aplikasi ini adalah sebagai pusat kontrol data manajemen peradilan agama sehingga mampu mengatur dan mengendalikan data berbasis teknologi informasi berupa pusat data dan ruangan khusus dengan berbagai peralatan khusus serta menjadi pusat pembinaan, pengawasan dan audit kinerja secara virtual dan realtime.

g. Aplikasi Basis Data Terpadu Kemiskinan;

Fungsi aplikasi ini adalah sebagai dasar untuk memberikan fasilitas pembebasan biaya perkara kepada masyarakat miskin dan sebagai salah satu bukti bahwa seseorang masuk dalam daftar penduduk miskin berdasarkan basis data terpadu dari pemerintah;

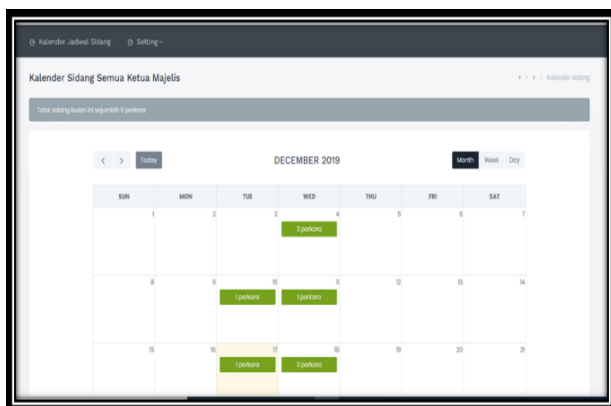
h. Aplikasi PNBP fungsional;

Fungsi aplikasi ini adalah sebagai pencatatan PNBP secara lengkap mencakup jumlah, nomor dan transaksi perkara, juga sebagai sarana informasi jumlah perkara yang belum disetorkan PNBP fungsional ke kas Negara dalam tahun berjalan serta sebagai pengukuran kinerja Kasir dan Bendahara penerimaan.

i. Aplikasi *E-Examinasi*;

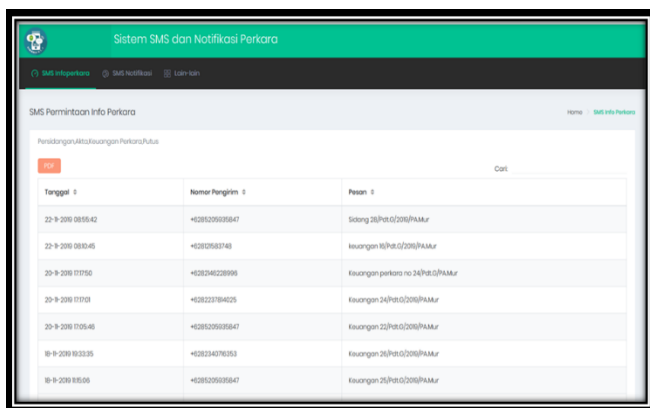
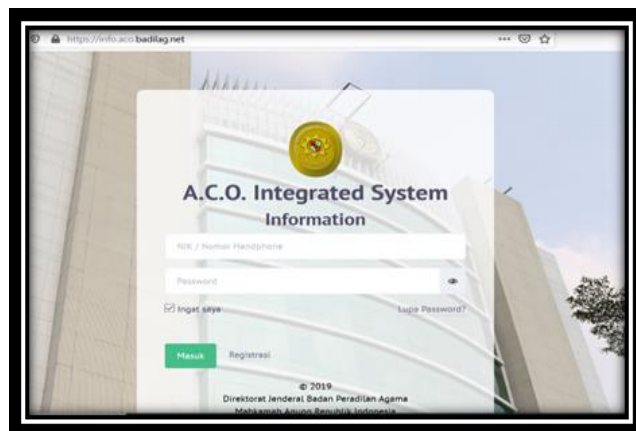
Fungsi aplikasi ini adalah untuk meningkatkan profesionalisme Hakim, baik dari segi teknis yuridis maupun administrasi perkara serta sebagai bahan masukan berupa fakta dan data pelaksanaan hukm materil dan formil oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara;

Dari 9 (sembilan) aplikasi inovasi Badilag tersebut seluruhnya telah di implementasikan di Pengadilan Agama Maumere, walaupun ada beberapa aplikasi yang masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut agar dapat lebih optimal implementasi aplikasi tersebut dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan. Pengadilan Agama Maumere telah melaporkan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama melalui Pengadilan Tinggi Agama NTT tentang implementasi 9 (sembilan) aplikasi inovasi Badan Peradilan Agama.



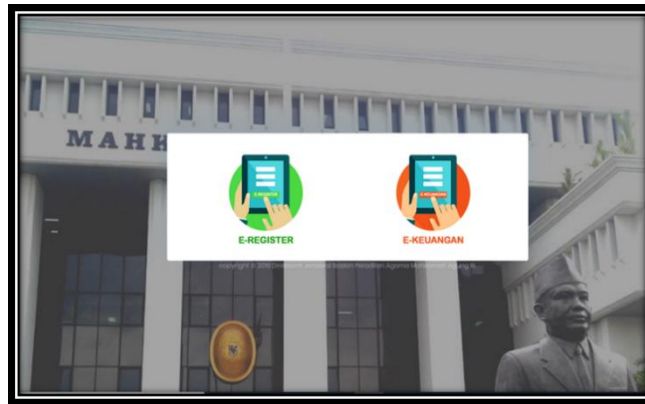
Gambar 28. Tampilan Aplikasi Antrian Sidang PA. Maumere

Gambar 29. Tampilan Aplikasi Informasi Produk Pengadilan PA. Maumere



Gambar 30. Tampilan Aplikasi Notifikasi Perkara PA. Maumere

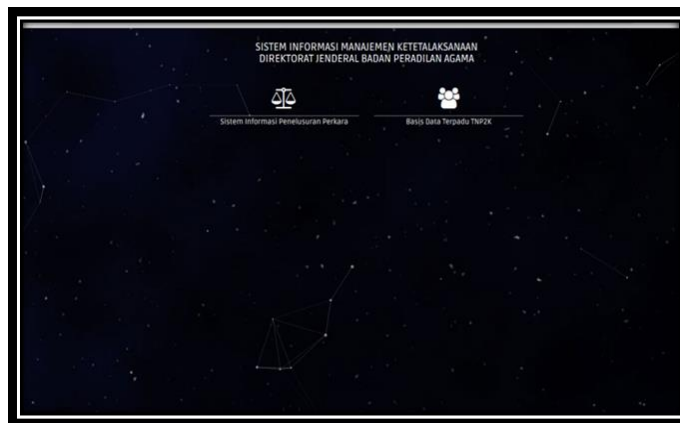
Gambar 31. Tampilan Aplikasi Aplikasi E-Register dan E-Keunagan PA. Maumere



Gambar 32. Tampilan Aplikasi Aplikasi PNBP Fungsional PA. Maumere



Gambar 33. Tampilan Aplikasi Aplikasi PNBP Fungsional PA. Maumere



Gambar 34. Tampilan Aplikasi Command Center PA. Maumere



Pengadilan Agama Maumere juga selalu berusaha untuk berkarya dengan melahirkan inovasi-inovasi yang mendukung peningkatan pelayanan baik bagi internal aparaturnya maupun demi kepentingan masyarakat pencari keadilan. Pada Bulan Desember 2019 Pengadilan Agama Maumere juga mengeluarkan **Aplikasi Taksiran Panjar Biaya Perkara**. Aplikasi ini berplatform Excell yang dikombinasi dengan Visual Basic. Tujuan aplikasi adalah memudahkan dalam menaksir panjar biaya perkara, baik bagi petugas maupun pihak/masyarakat yang akan mendaftar perkara. Aplikasi ini dapat menaksir jumlah panjar biaya untuk semua jenis perkara, baik gugatan maupun permohonan, baik penggugat/pemohonnya diketahui alamatnya maupun tidak. Aplikasi ini juga bisa untuk menaksir biaya perkara yang penggugat/pemohonnya berada di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere. Berikut ini adalah fitur dan tampilan aplikasi panjar biaya perkara.

Berikut tutorial dan tampilan aplikasi panjar biaya perkara

Gambar 35. Tampilan Awal aplikasi taksir panjar biaya perkara

Tampilan Awal

Fitur :

1. Sangat mudah digunakan (*user friendly*) karena dapat digunakan oleh siapa saja tanpa syarat kualifikasi pendidikan
2. Aplikasi ini memiliki 3 (tiga) fitur utama, yaitu: Input Data, Cetak, dan Keluar
 - a. Input Data

Untuk memperoleh besaran taksiran panjar biaya perkara secara valid, pengguna (*user*) hanya perlu memasukkan 3 data: Jenis Perkara, Jumlah Pihak, dan nama Desa, yang semuanya sudah tersedia di dalam Aplikasi, sehingga pengguna hanya perlu klik dan pilih pada kolom yang disediakan.

b. Cetak

Setelah data yang diperlukan diinput, total dan rincian biaya langsung bisa terlihat dibagian bawah aplikasi. Sekalipun demikian, pengguna yang ingin mencetak halis taksiran hanya perlu mengklik tombol CETAK, dan aplikasi akan otomatis mencetak slip taksiran panjar biaya perkara.

c. Keluar

Pengguna yang telah selesai menggunakan aplikasi dapat mengklik tombol KELUAR untuk mengakhiri atau menutup aplikasi.

Gambar 36. Tampilan Pilihan jenis perkara aplikasi taksir panjar biaya perkara

Fitur Pilihan Jenis Perkara

Aplikasi Panjar Biaya Perkara - Microsoft Excel

APLIKASI TAKSIRAN PANJAR BIAYA PERKARA
PENGADILAN AGAMA MAUMERE
by Acep Sugiri

Jenis Perkara	:		
Jumlah P	:	CG	
Jumlah T	:	CT	
	:	GUGATAN LAIN	
	:	PERMOHONAN	
Desa P	:		
Radius	:	#N/A	
Tarif	:	-	
Jumlah Pgl	:	2	
	:		
Tarif Tabayun	:		

RINCIAN BIAYA:

Pendaftaran	:	30,000
Proses/ATK	:	50,000
Panggilan P	:	-
Panggilan T	:	-
PNBP Pgl 1 P	:	-
PNBP Pgl 1 T	:	-
PNBP Pbt T	:	-
PNBP Pencabutan	:	-
Meterai	:	6,000
Redaksi	:	10,000
TOTAL PANJAR	:	96,000

KELUAR CETAK

Gambar 37. Pilihan Desa aplikasi taksir panjar biaya perkara

Fitur Pilihan Desa (Alamat)

Aplikasi Panjar Biaya Perkara - Microsoft Excel

APLIKASI TAKSIRAN PANJAR BIAYA PERKARA
PENGADILAN AGAMA MAUMERE
by Acep Sugiri

Jenis Perkara	:	CT	
Jumlah P	:	1	
Jumlah T	:	1	
Desa P	:	Beru	Desa T
Radius	:	1	Radius
Tarif	:	75,000	Tarif
Jumlah Pgl	:	3	Jumlah Pgl
Tarif Tabayun	:		

RINCIAN BIAYA:

Pendaftaran	:	30,000
Proses/ATK	:	50,000
Panggilan P	:	225,000
Panggilan T	:	-
PNBP Pgl 1 P	:	10,000
PNBP Pgl 1 T	:	10,000
PNBP Pbt T	:	10,000
PNBP Pencabutan	:	-
Meterai	:	6,000
Redaksi	:	10,000
TOTAL PANJAR	:	351,000

KELUAR CETAK

Aplikasi Panjar Biaya Perkara - Microsoft Excel

TAKSIRAN PANJAR BIAYA PERKARA
PENGADILAN AGAMA MAUMERE

RINCIAN BIAYA:

1	Pendaftaran	:	30,000
2	Proses/ATK Perkara	:	50,000
3	Panggilan Penggugat/ Pemohon (P)	:	225,000
4	Panggilan Tergugat/ Termohon (T)	:	460,000
5	PNBP Panggilan 1 P	:	10,000
6	PNBP Panggilan 1 T	:	10,000
7	PNBP Pemberitahuan Putusan kepada T	:	10,000
8	PNBP Pencabutan	:	-
9	Meterai	:	6,000
10	Redaksi	:	10,000
	TOTAL	:	811,000

CATATAN:

1	Taksiran di atas bersifat global, belum termasuk panggilan mediasi, sita, dan pemeriksaan setempat. Bila terjadi kelebihan atau kekurangan akan diberitahukan.
2	Hal-hal yang belum paham dapat ditanyakan kepada Petugas

Terima kasih atas kunjungan Anda

Gambar 38. Pilihan Desa aplikasi taksir panjar biaya perkara

Fitur Cetak Slip Taksiran Panjar

Aplikasi ini sudah disosialisasikan oleh Ketua Pengadilan Agama Maumere selaku penggagas dan pembuat aplikasi tersebut kepada para Hakim, Pejabat Kepaniteraan, dan Petugas PTSP. Meskipun masih bersifat sederhana, Aplikasi ini sangat membantu khususnya para pencari keadilan karena hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat nilai taksir panjar biaya perkara dapat diketahui dan dicetak. Untuk sementara aplikasi ini baru digunakan dalam internal Pengadilan Agama Maumere, karena masih dalam tahap pengembangan dan penyempurnaan dengan fitur yang lebih lengkap, seperti taksiran biaya banding, kasasi, PK, sita, pemeriksaan setempat (PS), dan eksekusi. Setelah fitur-fitur tersebut dilengkapi, Ketua Pengadilan Agama Maumere menargetkan aplikasi tersebut dapat digunakan minimal untuk Pengadilan Agama di seluruh wilayah PTA Nusa Tenggara Timur. Selain itu, Ketua Pengadilan Agama Maumere juga mengharapkan untuk ke depannya Aplikasi ini dapat dibuatkan versi onlinenya.

Gambar 39. Foto Sosialisasi Aplikasi Panjar Biaya Perkara



BAB VI

PENGAWASAN

A. Internal

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen dalam menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas pokok dan fungsi dapat dijalankan sesuai rencana strategis serta aturan yang berlaku. Dalam hal Pengawasan Pengadilan Agama Maumere telah berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, dan KMA Nomor : 145/KMA/SK/SK/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007. Pengadilan Agama Maumere telah melaksanakan kegiatan dimaksud, dimana dalam pelaksanaan Pengawasan tersebut yang menjadi Koordinator Pengawas adalah Wakil Ketua Pengadilan Agama Maumere, dengan mengkoordinir seluruh Hakim yang menjadi Pengawas Bidang.

Inti dari sebuah pengawasan adalah pengendalian dimana pengendalian tersebut juga terdiri dari 2 (dua) aspek yang tidak dapat dipisahkan yaitu pengawasan dan pembinaan. Sehingga pengawasan harus dapat dilakukan dengan sungguh-sungguh agar mampu menciptakan organisasi yang baik dan berkesinambungan.

1. Pengawasan Melekat

Dalam pengawassan melekat ini bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan terhadap bawahan secara preventif dan refresif agar tugas-tugas bawahan berjalan secara efektif dan efisien. Pada Pengadilan Agama Maumere, pengawasan melekat dilakukan oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Maumere secara berkala mengawasi pelaksanaan tugas sehari-hari. Demikian juga pengawasan dilakukan melalui rapat-rapat pembinaan secara periodik, sebagaimana Perma Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung, maka yang bertanggungjawab untuk mengawasi dan membina Hakim dan PNS dalam satuan kerja Pengadilan Tingkat Pertama adalah Ketua Pengadilan. Oleh karena itu untuk mencapai hasil pengawasan yang maksimal,

Ketua Pengadilan Agama Maumere telah menunjuk Hakim pengawas bidang yang bertugas membantu pimpinan untuk mengawasi bawahannya sesuai dengan bidang tugas masing-masing untuk melaksanakan pengawasan setiap triwulan dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Maumere dengan tembusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama NTT.

Untuk lebih menguatkan peranan dan fungsi Pembinaan serta Pengawasan Bidang Ketua Pengadilan Agama Maumere telah membuat sebuah regulasi dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : W23-A9/07/PS.00/I/2019 Tentang Penunjukan Hakim Pengawas Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019 yang susunannya sebagai berikut :

Tabel . 51. Susunan Tim Hawasbid PA. Maumere

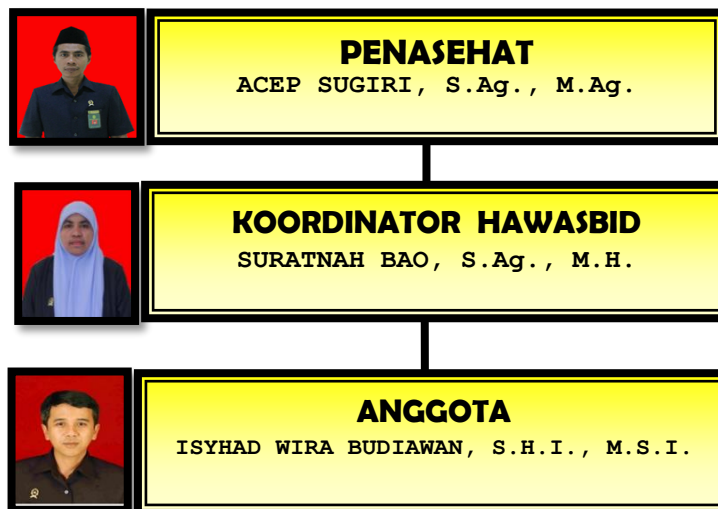
No.	N a m a / NIP	J a b a t a n	Hakim Pengawas Bidang
1.	Awaluddin, S.H.I., M.H. NIP. 19641231 199303 1 052	Ketua/ Hakim Madya Pratama	Penasihat/ Pengarah
2.	Sriyani HN, S.Ag., MH NIP. 19721231 200112 2 003	Wakil Ketua	Koordinator Pengawasan/ Hakim Pengawas Bidang Kesekretariatan
3.	Ahmad Imron, S.H.I. M.H. NIP. 197804272006041004	Hakim Pratama Utama	Pengawas Bidang Kepaniteraan

Kemudian karena adanya promosi dan mutasi Ketua, Wakil Ketua serta Hakim Pengadilan Agama Maumere sehingga perlu dilaksanakan pembaharuan Susunan ataupun komposisi Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Agama Maumere Tahun 2019 sebagaimana dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Maumere Nomor : W23-A9/474/PS.01/SK/05/2019 tanggal 16 Mei 2019 tentang Revisi Penunjukan Hakim Pengawas Bidang Pada Pengadilan Agama Maumere Tahun 2019 yang susunannya adalah sebagai berikut :

Tabel . 52. Susunan Revisi Tim Hawasbid PA. Maumere

No.	N a m a / NIP	J a b a t a n	Hakim Pengawas Bidang
1.	Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. NIP. 19730804 200112 1 003	Ketua/ Hakim Madya Pratama	Penasihat/ Pengarah
2.	Suratnah Bao, S.Ag., M.H NIP. 19740301 200604 2 001	Wakil Ketua	Koordinator Pengawasan/ Hakim Pengawas Bidang Kesekretariatan
3.	Isyhad Wira Budiawan, S.H.I. M.S.I. NIP. 19801110 201101 1 001	Hakim Pratama Madya	Pengawas Bidang Kepaniteraan, SIPP, PTSP dan <i>E-Court</i>

Tabel. 53. Bagan Tim Hawasbid PA. Maumere Tahun 2019



Pelaksanaan Pengawasan yang telah berjalan di Pengadilan Agama Maumere telah secara rutin/reguler sesuai dengan jadwal pengawasan yang berikan kepada masing-masing bidang.

Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang yang dikoordinatori oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Maumere yang hasilnya kemudian dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama Maumere sebagai penanggung jawab tugas-tugas yang dilaksanakan. Selanjutnya Ketua Pengadilan Agama Maumere dapat mempelajari hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang untuk dijadikan bahan evaluasi kinerja Aparatur Peradilan yang dipimpinnya.

Adapun selama periode bulan Januari sampai dengan Desember 2019, pada Pengadilan Agama Maumere telah dilakukan Pengawasan dan Pembinaan oleh Hakim Pengawas Bidang selama 4 (empat) periode dan Hasil Pengawasan Hakim Pengawasan Bidang telah ditindaklanjuti seluruhnya pejabat terkait baik melalui laporan hasil tindaklanjut maupun dengan pelaksanaan yang membutuhkan action ataupun tindakan perubahan yang sifatnya segera semua telah dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan petunjuk teknis, Standar Operasional Prosedur (SOP) serta arahan dari Hakim Pengawas Bidang.



Gambar 40. Laporan Hasil Pengawasan Bidang



Gambar. 41. Laporan Tindaklanjut Hasil Pengawasan Bidang

2. Pengawasan Fungsional

Pengawasan fungsional dilaksanakan oleh pihak yang memahami substansi kerja objek yang diawasi dan ditunjuk khusus untuk melakukan audit independent terhadap objek yang diawasi, dalam hal ini pengawasan fungsional Pengadilan Agama Maumere dalam melaksanakan tugas-tugasnya diawasi langsung oleh Pengadilan Tinggi Agama NTT dan Badan Pengawasan (Bawas) dari Mahkamah Agung RI selaku atasan langsung. Pemeriksaan dimaksud untuk mengetahui sejauh mana Pengadilan Agama Maumere dalam tertib administrasi, organisasi finansial Peradilan, terselenggaranya manajemen Peradilan yang baik dan benar serta memberikan pembinaan secara langsung. Pemeriksaan tersebut sangatlah berarti karena kinerja Pengadilan Agama Maumere bisa diukur dari hasil pemeriksaan tersebut dan hasilnya baik walaupun tentunya belum sempurna karena masih ada beberapa yang perlu adanya sedikit perbaikan dan pembaharuan, namun sebagai catatan diharapkan kedepan akan lebih disempurnakan sehingga mampu memenuhi target dan capaian yang diinginkan sesuai dengan rencana strategis dan Program Kerja yang telah ditetapkan.

B. Evaluasi

Untuk melihat hasil kinerja apakah mengalami peningkatan ataupun penurunan maka dibutuhkan sebuah evaluasi yang progresif. Evaluasi hasil pengawasan dimaksudkan untuk melakukan tindakan perbaikan sistem manajemen maupun tata kelola serta pencegahan terhadap pelaksanaan kinerja yang tidak atau belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang secara periodik telah dilaksanakan dengan baik setiap triwulan (tiga bulan) sekali, hal ini disesuaikan dengan jadwal pembinaan dan pengawasan dari Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawasan (HATIBINWASDA) dari Pengadilan Tinggi Agama NTT sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun. Hasil-hasil pengawasan yang dilakukan oleh Hawasbid yang merupakan temuan, menjadi bahan bagi Wakil Ketua Pengadilan Agama Maumere (sebagai koordinator pengawasan) untuk menindaklanjuti dan menuangkan dalam sebuah Laporan Hasil Pengawasan Bidang dan di laporkan kepada Ketua Pengadilan Agama

Maumere serta tembusan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama NTT cq. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama NTT (Koordinator HATIBINWASDA) sebagai bahan evaluasi, dan juga hasil pengawasan tersebut disampaikan kepada Masing-masing kepada Panitera dan Sekretaris selaku penanggungjawab masing-masing bagian. untuk segera menindaklanjuti dan membenahi segala hal yang menjadi temuan dan menuangkannya dalam bentuk laporan Tindaklanjut Hasil Pengawasan Bidang, baik hal-hal yang menyangkut kepaniteraan maupun yang berkenaan dengan kesekretariatan.

Ada dua bidang evaluasi yang terkait yaitu :

b. Bidang Kepaniteraan (Administrasi Perkara)

- a. Evaluasi bidang Kepaniteraan yaitu dengan mengadakan rapat rutin dengan para Hakim, dengan Panitera Pengganti, serta rapat dengan Jurusita;
- b. Mengadakan Rapat, Sosialisasi dan DDTK kepada Tim SIPP, Petugas PTSP dan *E-Court*;
- c. Mengadakan rapat minimal 1 bulan sekali dengan seluruh aparatur Pengadilan Agama Maumere;
- d. Pengawasan dan pembinaan dari Pengadilan Tinggi Agama NTT;

c. Bidang Kesekretariatan (Administrasi Umum)

- a. Evaluasi bidang Kesekretariatan yaitu dengan mengadakan rapat-rapat dengan para Kassubag, petugas operator SIMAK BMN dan Operator SAKPA, Tim Teknologi Informasi, dan Pengelola Website;
- b. Mengadakan rapat minimal 1 bulan sekali dengan seluruh aparatur Pengadilan Agama Maumere;
- c. Pengawasan dan pembinaan dari Pengadilan Tinggi Agama NTT.

Pengadilan Agama Maumere telah mengadakan upaya Evaluasi sebagaimana tindak lanjut dari Perma Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengadakan sosialisasi kepada seluruh aparat Pengadilan Agama Maumere perihal diterbitkannya implementasi dari terbitnya Perma Nomor 8 tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan

Badan Peradilan di bawahnya, yang dalam salah satu pasalnya menyatakan bahwa kewajiban Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan Tugas Pengawasan dengan memberikan arahan dan pembinaan agar seluruh aparatur dalam tempat kerjanya tersebut tetap memiliki integritas disiplin kerja, mengindahkan kode etik baik hakim/PNS dan mempedomani perilaku yang baik, baik dalam kedinasan maupun diluar kedinasan.

2. Peningkatan kedisiplinan aparatur Pengadilan Agama Maumere baik dalam hal disiplin Absensi Jam masuk, Istirahat dan Pulang maupun disiplin pelaksanaan hasil kinerja;
3. Mengadakan assessment intenal sebagai upaya perbaikan terus-menerus terhadap terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan dan tertibnya implementasi administrasi baik dibidang kepaniteraan maupun kesekretariatan.
4. Mengadakan sosialisasi hasil rapat pembinaan, rapat kerja daerah dan rapat kerja nasional baik yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama NTT maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia.
5. Hakim Pengawas bidang yang telah di tunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maumere telah melakukan pemeriksaan secara komperhensif tentang tugas pokok dilingkungan kepaniteraan dan kesekretariatan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dengan tata cara sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan Hakim Pengawas Bidang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali;
 - b. Setelah melakukan pemeriksaan masing-masing hakim pengawas bidang membuat laporan hasil pengawasan yang dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaaan dan dilampiri hasil temuan hakim pengawas serta rekomendasi tindak lanjut untuk mengatasi hambatan yang ditemukan.
 - c. Berita acara pemeriksaan dan hasil temuan serta rekomendasi tersebut, diserahkan kepada Wakil Ketua selaku koordinator dan selanjutnya diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama Maumere untuk dievaluasi;
 - d. Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Maumere setelah melakukan evaluasi atas hasil temuan Hakim Pengawas Bidang, memberikan tindak lanjut

dengan memerintahkan kepada Panitera dan Sekretaris agar segera melakukan perbaikan-perbaikan dalam jajarannya dengan skala prioritas.

BAB VII



A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan tugas pokok yang dilaksanakan Pengadilan Agama Maumere telah berjalan dengan baik dan telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kemampuan Sumber daya Manusia yang ada, walaupun secara realitas masih sangat membutuhkan dukungan sarana dan prasarana teknologi informasi baik dalam memenuhi pelayanan secara internal maupun pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan;
2. Implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) dan Zona Integritas diharapkan dapat mewujudkan Pengadilan Agama Maumere menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBBK) dan Wilayah Bersih dan Melayani (WBBM), sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan, dan juga dengan harapan Pengadilan Agama Maumere mendapatkan kenaikan kelas dari Kelas II menjadi kelas 1 B.
3. Penyelesaian perkara tahun 2019 pada tingkat pertama telah diusahakan secara maksimal. Dari sisa tahun 2018 sebanyak 12 perkara, ditambah perkara yang diterima pada tahun 2019 sebanyak 55 perkara, telah berhasil diselesaikan sebanyak 64 perkara sehingga sisa perkara tahun 2019 sebanyak 3 perkara. Terdapat penurunan penerimaan perkara pada tahun 2019 yaitu sebanyak 55 dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu sebanyak 65, sehingga jumlah perkara yang berhasil diselesaikan pada tahun 2019 mengalami penurunan;
4. Dengan Implementasinya E-Letigasi Mahkamah Agung dan 9 (sembilan) aplikasi Inovasi Badan Peradilan Agama, sangat memberikan kontribusi yang besar dalam mendukung pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Maumere, khususnya dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan, karena baik lembaga hukum maupun masyarakat sangat merasa terbantu dengan hadirnya pembaharuan

peradilan yang berbasis teknologi informasi sesuai dengan asas beracara di Pengadilan yaitu Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.

5. Pagu Anggaran belanja Kantor Pengadilan Agama Maumere (402851) Unit Organisasi (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2018 setelah mengalami revisi-06 sebesar Rp. 2.320.898.000 (*Dua Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah*) sedangkan anggaran yang terealisasi yaitu sebesar Rp. 2.260.311.232,- (*Dua miliar dua ratus enam puluh juta tiga ratus sebelas ribu dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah*) atau sebesar 97,39%. Terdapat sisa anggaran pada belanja gaji dan tunjangan pegawai sebesar Rp. 20.955.064,- (*Dua puluh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu enam puluh empat rupiah*), belanja barang sebesar Rp. 39.098.704,- (*Tiga puluh sembilan juta sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah*) dan belanja modal sebesar Rp. 533.000,- (*Lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*).
6. Pagu Anggaran belanja kantor Pengadilan Agama Maumere (402852) Unit Organisasi (04) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2018 sebesar Rp. 63.840.000,- (*Enam puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah*) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 63.840.000,- (*Enam puluh tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah*) atau sebesar 100 %.
7. Dengan adanya alokasi anggaran Prodeo, Sidang Keliling dan Posbakum sangat memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat, karena masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya pelayanan hukum dan pelayanan perkara dengan secara cuma-cuma atau gratis kepada masyarakat. Khususnya masyarakat yang berada di kepulauan Desa Gunung Sari yang di tahun 2019 telah 2 kali mendapatkan kunjungan kegiatan Sidang Keliling Pengadilan Agama Maumere dalam sidang istbat nikah.
8. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugas Peradilan selain dukungan sarana dan prasarana yang telah dijabarkan diatas, juga sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang memadai untuk meningkatkan kinerja aparatur pegawai Pengadilan Agama Maumere maupun pelaksanaan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan karena dengan keterbatasan Sumber Daya

Manusia yang ada pada Pengadilan Agama Maumere saat ini berdampak kepada adanya Pegawai yang merangkap Jabatan/pekerjaan pada bidang Kesekretariatan maupun pada bidang Kepaniteraan, hal ini tidak lain untuk memenuhi optimalisasi fungsi peradilan agar berjalan dengan baik dan lancar terlebih pada peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan;

9. Pelaksanaan tugas pembinaan dan fungsi pengawasan baik dalam bidang administrasi dan teknis yudisial maupun administrasi umum telah dilaksanakan dengan baik dan berjalan secara efektif karena adanya respon timbal balik sebagai wujud tindaklanjut dari hasil pengawasan bidang;
10. Pelaksanaan implementasi Teknologi Informasi dan transparansi peradilan sudah berjalan dengan baik dengan didukung website Pengadilan 1 Maumere yaitu *pa.maumere.go.id* yang selalu terupdate, aplikasi Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dengan menggunakan versi terbaru 3.3.0, Komdanas, Sikep MARI, dan Aplikasi Backup Sikep (ABS), Direktori Putusan serta sistem Informasi Perkara (SIPP) Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah terintegrasi dengan Website Pengadilan Agama Maumere. Aplikasi Sistim Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Agama Maumere, juga terhubung dengan monitor pada ruang tunggu sidang pada Pengadilan Agama Maumere yang memudahkan masyarakat melihat jadwal sidang di Pengadilan Agama Maumere serta Aplikasi Keuangan (SAKTI) yang telah disosialisaikan oleh Kementerian Keuangan dan akan dioptimalisasikan di Tahun 2020 mendatang.

B. Rekomendasi

1. Agar Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Agama dapat lebih meningkatkan optimalisasi fungsi aplikasi yang telah di launching untuk digunakan pada satuan kerja tingkat pertama sehingga pelayanan masyarakat pencari keadilan dapat dilakukan secara optimal.
2. Agar Mahkamah Agung RI lebih mencanangkan peningkatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) untuk Pejabat Struktural dan Fungsional untuk lebih

meningkatkan pengalaman dan kompetensi SDM aparatur khususnya kualitas SDM berbasis teknologi informasi.

3. Dalam Hal Sumber Daya Manusia hendaknya Mahkamah Agung RI dapat menambah /memindahkan pegawai yang berada disatuan kerja yang jumlah aparaturnya lebih banyak sehingga Pengadilan Agama Maumere mendapatkan tenaga Pegawai baru untuk mengisi kekosongan jabatan maupun aparatur saat ini.
4. Agar Mahkamah Agung RI dapat menambah alokasi anggaran baik dalam sarana dan prasarana maupun belanja modal di Pengadilan Agama Maumere khususnya sebagai pendukung meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan.

LAMPIRAN**1. SK. Tim Penyusun Laporan Tahunan Tahun 2019**

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA MAUMERE
NOMOR : W23-A9/ 800 /KP.00.3/SK/10/2019**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN
PADA PENGADILAN AGAMA MAUMERE
TAHUN 2019**

KETUA PENGADILAN AGAMA MAUMERE

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Tahunan di Pengadilan Agama Maumere Tahun 2019 yang efektif dan efisien Maka, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Tahunan di Pengadilan Agama Maumere Tahun 2019;
2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
8. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RB. Nomor : 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/1/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MAUMERE TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN PADA PENGADILAN AGAMA MAUMERE TAHUN 2019;**
- PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Maumere Nomor : W23-A9/ 651 /OT.01.1/SK/11/2018 tanggal 23 November 2018;
- KEDUA : Menunjuk dan mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran I Susunan Tim Penyusun Laporan Tahunan pada Pengadilan Agama Maumere Tahun 2019;
- KETIGA : Menetapkan Struktur Tim sebagaimana tercantum lampiran II Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT : Uraian Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun Laporan Tahunan pada Pengadilan Agama Maumere Tahun 2019 sebagaimana tercantum lampiran III Surat Keputusan ini;
- KELIMA : Agar pegawai yang ditunjuk dan diangkat dalam Tim Penyusun Laporan Tahunan dapat melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maumere
Pada Tanggal : 03 Oktober 2019



Ketua,

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730804 200112 1 003

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Maumere
 Nomor : W23-A9/ 800 /KP.00.3/SK/10/2019
 Tanggal : 03 Oktober 2019

**SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN
 PADA PENGADILAN AGAMA MAUMERE
 TAHUN 2019**

- | | |
|---|--|
| A. Pengarah | : Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.
(Ketua Pengadilan Agama Maumere) |
| B. Ketua Tim Penyusun | : Rakimin Syarif, S.Ag. |
| C. Sekretaris Tim | : Tomi Pramana Putra, S.H. |
| D. Koordinator Korektor
Anggota : | : 1. Suratnah Bao, S.Ag., M.H.
2. Isyhad Wira Budiawan, S.H.I., M.S.I. |
| E. Kordinator Penyajian Data Kepaniteraan
Anggota | : 1. Drs. Yacub, M.H.
: 2. Abdullah, S.H., M.H.
: 3. Yuhermi Natar, B.A.
: 4. Sigit Apriluberta, S.H
: 5. Tomi Pramana Putra, S.H.
: 6. Hamzah Usman
: 7. Ika Asti Hana, S.E. |
| F. Kordinator Penyajian data Kesekretariatan
Anggota : | : 1. Moch. Idris Djawas, S.Kom., M.H.
: 2. Tomi Pramana Putra, S.H.
: 3. Fakar Nur Halim, S.Kom.
: 4. Hamzah Usman
: 5. Saudah Yahya, S.H.I. |
| G. Operator Penyusun | : 1. M. Ikram Muslimin, S.E.
: 2. Arif Budi Satriawan, S.ST. |

Ditetapkan di : Maumere
 Pada Tanggal : 03 Oktober 2019



Ketua,

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.
 NIP. 19730804 200112 1 003

2. Foto -Foto Kegiatan Tahun 2019



- Ketua dan Wakil Ketua PA. Maumere menghadiri Rapat Kerja Daerah PTA NTT bersama PA-Ge-Wilayah PTA. NTT.

- Pegawai PA. Maumere bersama TNI-AL, Polres Sikka, Basarnas Maumere dan Pemda Sikka Menghadiri Upacara Peringatan hari Sampah Sedunia



- Panitera PA. Maumere menghadiri Sosialisasi E-K keuangan dan E-Register oleh PTA. NTT sekaligus penyerahan penghargaan SIPP

- Ketua PA. Maumere bersama Bupati Sikka dan Forkompinda Menghadiri Upacara HUT Basarnas ke-74 Tahun 2019





- Pelantikan Wakil ketua PA. Maumere (Suratnah Bao, S.Ag., M.H.) yang dihadiri oleh Wakil Bupati Sikka

- Pelantikan Ketua PA. Maumere (Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.) Oleh Ketua PTA. NTT



- Foto Bersama Ketua PTA. NTT bersama Ketua PA. Se-Wilayah NTT

- Pelantikan Hakim PA. Maumere An. Isyhad Wira Budiawan, S.H.I., M.S.I. Oleh. Ketua PA. Maumere





- Aparatur PA. Maumere Melaksanakan Upacara HUT Kemerdekaan RI ke -74 Tahun 2019

- Aparatur PA dan PN Maumere Melaksanakan Upacara bersama HUT MARI ke -74 Tahun 2019



- Ketua PA. Maumere menghadiri acara HUT Darmayukti Karini Cab. Maumere Tahun 2019

- Aparatur PA dan PN Maumere Melaksanakan Anjongsana Ke Panti Asuhan dalam Rangka HUT MARI ke -74 Tahun 2019





- Ketua PA. Maumere bersama Tim PTWP PA. Maumere

- Ketua PA. Maumere Menghadiri Pelantikan Anggota DPRD Kab. Sikka Periode 2019-2024



- Sosialisasi Sistem Informasi Pengadilan oleh PTA. NTT yang diakhiri oleh PA. Maumere, PA. Ende dan PA. Larantuka

- Sosialisasi BAZNAS Kab. Sikka di PA. Maumere

